

**KAJIAN FUNGSI INSPEKTORAT TERKAIT PENGAWASAN INTERNAL:  
SEBUAH PENDEKATAN SEMIOTIKA  
(Studi pada Inspektorat Kabupaten Jeneponto)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Akuntansi Pada  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

**OLEH :**

**FEBRINA SAFITRI AHMAD**

**90400115148**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Febrina Safitri Ahmad

NIM : 90400115148

Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 09 Februari 1997

Jur/Prodi/Konsentrasi : Akuntansi

Fakultas/Program : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul : Kajian Fungsi Inspektorat terkait Pengawasan Internal:  
Sebuah Pendekatan Semiotika (Studi pada Inspektorat  
Kabupaten Jeneponto)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Februari 2020

Penyusun,

**Febrina Safitri Ahmad**  
**90400115148**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ☎ (0411) 864924, Fax. 864923  
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo Romangrolong – Gowa ☎ 424835, Fax424836

#### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Kajian Fungsi Inspektorat terkait Pengawasan Internal: Sebuah Pendekatan Semiotika (Studi pada Inspektorat Kabupaten Jeneponto)”**, yang disusun oleh **Febrina Safitri Ahmad, NIM 90400115148**, Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 27 Februari 2020, bertepatan dengan 03 Rajab 1441 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Samata-Gowa, 27 Februari 2020 M.  
03 Rajab 1441 H.

#### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hj. Rahmawati Muin, M.Ag.	(.....)
Penguji I	: Dr. Syaharuddin, M.Si.	(.....)
Penguji II	: Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Lince Bulutoding, SE., M.Si., Ak.	(.....)
Pembimbing II	: Puspita H. Anwar, SE., M.Si., Ak.CA., CPA	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN  
Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.  
NIP. 19661130 199303 1 003

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Nabi yang memberi citra kepada manusia tentang bagaimana dan cara beretika sesuai tuntunan wahyu. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul **“Kajian Fungsi Inspektorat terkait Pengawasan Internal: Sebuah Pendekatan Semiotika (Studi pada Inspektorat Kabupaten Jeneponto)”**.

Ucapan terimakasih kepada seluruh keluarga besar terkhusus untuk kedua orang tua tercinta, ayahanda terkasih Achmad .S dan ibunda tercinta Djumariah Erang yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh cinta. Semoga jasanya dibalas oleh Allah swt. Aamiin.

Skripsi ini dapat tersusun atas bantuan dan perhatian berbagai pihak, yang dengan baik hati bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan informasi serta senantiasa memberikan semangat sehingga konsistensi selalu terjaga selama pengerjaan skripsi ini. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Hamdan Juhannis, M.Ag., Phd, selaku Rektor beserta Wakil Rektor I, II, III dan IV UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag selaku Dekan beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Memen Suwandi, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Ibu Dr. Lince Bulutoding, S.E., M.Si., Ak.CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Dr. Lince Bulutoding, S.E., M.Si., Ak.CA selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan waktu luangnya, saran, bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Puspita H. Anwar, S.E., M.Si., Ak.CA., CPA selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Sumarlin, S.E., M.Ak selaku penasehat akademik (PA) yang juga telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama penulis menjalani proses perkuliahan.
7. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

8. Segenap Staf Jurusan dan Pegawai Akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik selama penulis melakukan studi dan penyelesaian skripsi.
9. Teman-teman Akuntansi D 2015, terima kasih sudah menjadi partner berjuang selama proses perkuliahan hingga semester berakhir.
10. Teman-teman Akuntansi angkatan 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas motivasi, keakraban dan persaudaraannya selama penulis menempuh pendidikan di UIN Alauddin Makassar.
11. Semua keluarga, sahabat, teman-teman, dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan rekan-rekan mahasiswa serta pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga ilmu yang telah didapatkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Samata-Gowa, Februari 2020

Penyusun

**Febrina Safitri Ahmad**  
**NIM. 90400115148**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
ABSTRAK .....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1-15
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	13
F. Manfaat Penelitian .....	13
BAB II: TINJAUAN TEORETIS.....	16-33
A. Konsep Semiotika .....	16
B. Konsep Kejujuran .....	19
C. <i>Stewardship Theory</i> .....	20
D. Konsep Pengawasan .....	21
E. Fungsi Inspektorat .....	23
F. Independensi .....	26
G. Profesionalisme.....	28



H. Fungsi Inspektorat Daerah sebagai Pengawas Internal .....	30
I. Rerangka Pikir .....	32
<b>BAB III: METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>34-42</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	35
C. Sumber Data Penelitian .....	36
D. Metode Pengumpulan Data .....	36
E. Instrumen Penelitian .....	38
F. Teknik Analisis Data .....	38
G. Informan Penelitian .....	40
H. Uji Keabsahan Data .....	41
<b>BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43-70</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	43
1. Pemerintah Kabupaten Jenepono .....	43
a) Sejarah Kabupaten Jenepono .....	43
b) Pemerintahan .....	43
c) Visi dan Misi .....	44
2. Inspektorat Kabupaten Jenepono .....	45
a) Dasar Hukum Organisasi .....	45
b) Kedudukan, Tugas dan Fungsi .....	46
c) Struktur Organisasi .....	47
B. Hasil dan Pembahasan .....	53
1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Inspektorat Daerah Dari Aspek Sintaktika .....	53
2. Pelaksanaan Pengawasan Internal Inspektorat Daerah Dari Aspek Semantika .....	59

3. Pelaksanaan Pengawasan Internal Inspektorat Daerah  
Dari Aspek Pragmatika ..... 66

**BAB V: PENUTUP..... 71-74**

    A. Kesimpulan ..... 71

    B. Keterbatasan dan Saran Penelitian ..... 73

    C. Implikasi Penelitian ..... 74

**DAFTAR PUSTAKA ..... 75-79**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Rerangka Pikir .....	33
Gambar 4.1	Struktur Organisasi .....	52



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel 4.1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Inspektorat Daerah dari Aspek Sintaktika .....	58
Tabel 4.2 Pelaksanaan Pengawasan Internal Inspektorat Daerah dari Aspek Semantika.....	66
Tabel 4.3 Pelaksanaan Pengawasan Internal Inspektorat Daerah dari Aspek Pragmatika.....	70



## ABSTRAK

**Nama : Febrina Safitri Ahmad**

**Nim : 90400115098**

**Judul :Kajian Fungsi Inspektorat terkait Pengawasan Internal: Sebuah Pendekatan Semiotika (Studi pada Inspektorat Kabupaten Jeneponto)**

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam mengenai pelaksanaan pengawasan internal inspektorat daerah melalui pendekatan semiotika, yaitu dari aspek sintaktika, semantika dan pragmatika.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan semiotika bersifat *critical* paradigma. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari beberapa informan dan hasil observasi lapangan serta ditunjang dengan data-data lainnya, sedangkan data sekunder di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara seperti jurnal-jurnal yang menjadi pendukung dan bahan rujukan dan bukti atas temuan yang ada pada data primer. Metode pengumpulan data (untuk data primer) ialah peneliti melakukan wawancara secara mendalam, melalui studi pustaka, studi dokumentasi, dan *internet search*. Selanjutnya untuk menganalisis data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji keabsahan data dengan menggunakan 3 triangulasi yaitu triangulasi metode, triangulasi sumber, dan triangulasi teori.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pandangan aparatur pemerintah mengenai fungsi pengawasan internal inspektorat daerah melalui pendekatan semiotika adalah pandangan mengenai sisi semiotika itu sendiri yaitu: sintaktika, semantika, dan pragmatika. Dari analisis sintaktika dimaknai dengan fungsi Inspektorat Kabupaten Jeneponto yang merupakan Aparat Pengawas Internal Pemerinrtah (APIP) dilingkungan Kabupaten Jeneponto yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal jalannya program pemerintahan. Dari analisis semantika dimaknai dengan kegiatan fisis Inspektorat Kabupaten Jeneponto yang terbagi atas dua yaitu berdasarkan simbol fisik dan simbol kata pada standar operasional prosedur pemeriksaan reguler. Selanjutnya dari analisis pragmatik pada Kantor Inspektorat Kabupaten Jeneponto menunjukkan bahwa standar operasional prosedur pemeriksaan reguler yang disusun memberikan manfaat bagi para pengguna dalam hal peningkatan kinerja dan pemahaman para aparatur pemerintah.

**Kata Kunci: *Inspektorat Daerah, Pengawasan Internal, Semiotika***



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ditampilkan dalam pencapaian kinerja sebagaimana komitmen yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlu dipadukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggungjawab, dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme yang dalam penerapannya adalah membuat suatu tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik (Manossoh, 2015). Otonomi daerah berguna untuk mengurus kebijakan rumah tangga masing-masing, sehingga dalam praktiknya diperlukan upaya pengawasan internal untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya peningkatan penyelewengan anggaran. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan sebagai jaminan agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Syafrizal dkk., 2018). Adanya implementasi dari otonomi daerah ini merupakan salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Menurut Sudiran dan Jubaidi (2018) menyatakan bahwa aparat pengawasan intern pemerintah adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Hakikat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan,



pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi (Hamzah dkk., 2018).

Pengawasan intern merupakan seluruh proses kegiatan pengawasan, *review*, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Mahanani, 2018). Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memiliki peran masing-masing dalam membangun SPIP diunit kerjanya dan Inspektoratlah yang akan mengawal dan menilai efektivitas pelaksanaan SPIP tersebut. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan daerah secara andal, mengamankan aset daerah dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Manialup dkk., 2017). Menurut Muis (2014) bahwa dalam penerapan sistem pengendalian intern pemerintah daerah dibutuhkan komitmen mulai dari pimpinan dan seluruh pegawai agar bisa mencapai tujuan bersama, sehingga untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang baik diperlukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang handal, transparan, akuntabel dan sesuai ketentuan yang ada. Pemerintah daerah berupaya untuk bisa menjalankan sistem pengendalian intern dengan sebaik mungkin agar bisa mencapai tujuan.

Peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) di Indonesia merupakan bagian dari implementasi sistem pengendalian intern pemerintah, khususnya dalam rangka menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang positif dan kondusif. Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Salah satu unsur yang diperlukan untuk mendapatkan sistem pengendalian yang memadai adalah memperkuat peran APIP yang efektif (Arief dkk., 2018). Upaya untuk meningkatkan kinerja APIP yaitu dengan melakukan penilaian kapabilitas APIP, hal ini menjadi salah satu fokus pemerintah untuk segera diatasi. APIP dituntut untuk mampu memberikan nilai tambah dan membantu auditi mengenali resiko-resiko yang akan menghambat perbaikan kinerja audit (Ruhbaniyah dkk., 2012).

Inspektorat berperan untuk memastikan penyelenggaraan SPIP dipemerintah daerah, apakah sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan atau pedoman serta melakukan pemantauan secara berkala karena penyelenggaraan SPIP di SKPD merupakan mesin penggerak organisasi (Manialup dkk., 2017). Inspektorat diharapkan tidak menjadi instansi yang selalu mencari kesalahan meskipun kesalahan tersebut sangat kecil yang dapat menyebabkan instansi teknis menjadi tidak nyaman. Hal ini juga telah dijelaskan dalam Islam, salah satu kebiasaan buruk manusia yang tak ada habisnya adalah mencari kesalahan orang lain. Tak ada yang membayarnya, namun masih banyak yang rela memata-matai tiap kesalahan orang lain. Dan bahkan Allah memisalkan orang yang bersikap seperti itu laksana manusia yang memakan

daging saudaranya yang sudah mati. Jangankan memakan, membayangkan saja sudah menjijikkan. Kalaupun demikian, masih sudikah kita mencari-cari kesalahan orang lain? Dalam QS Al-Hujurat/49: 12 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا  
أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ ۚ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”

Besarnya tingkat kebocoran penggunaan dana yang bersumber dari APBD dan APBN diakibatkan oleh lemahnya pengendalian dan pengawasan internal. Pengawasan di lingkungan pemerintahan dilaksanakan oleh aparat pengawasan ekstern pemerintah, yaitu BPK RI dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri atas BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Kementerian/LPND serta Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah lembaga pengawasan yang banyak tersebut tidak diikuti dengan kinerja yang diharapkan (Haris dan Kusmanto, 2016). Menurut Trisnawati dkk. (2018) bahwa pengawasan internal masih menghadapi kendala di berbagai pemerintah daerah di Indonesia. Aparat pengawasan belum cukup berintegritas dan memiliki kapabilitas, maka aparat pengawasan belum benar-benar independen, dan kebutuhan jumlah personel aparat pengawasan belum terpenuhi. Terjadinya penyimpangan yang berulang-ulang dalam bentuk kerugian negara mengakibatkan

rendahnya keberhasilan program sehingga efisiensi pelaksanaan kegiatan mengakibatkan tumpang tindih dalam pelaksanaan pengawasan, maka dari itu dianggap pengawasan tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal ini, permasalahan juga muncul di Kabupaten Jenepono, dimana pada tahun anggaran 2016 pengawasan yang dilakukan inspektorat kabupaten dinilai kurang optimal yaitu kurangnya pengawasan terhadap aset daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kelemahan terhadap sistem pengendalian intern pemerintah daerah dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku disebabkan karena pelaksana yang bertanggungjawab, lalai dalam tugasnya dan tidak cermat dalam menyajikan laporan keuangan serta sistem pengelolaan keuangan tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Hal ini berarti bahwa peran dan fungsi pengawasan intern dan pengawasan ekstern belum dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (Setiawan dan Putro, 2013).

Pertanggungjawaban dan proses pengelolaan keuangan daerah maupun keuangan negara, hingga kini masih diperbincangkan, baik di dalam lingkup akademik maupun publik serta masyarakat pada umumnya karena negara sebagai sebuah badan hukum publik pada umumnya mempunyai kewajiban-kewajiban yuridis dan administratif dalam hal penyelenggaraan dan pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara (Risambessy, 2009). Laporan keuangan merupakan salah satu alat yang bermanfaat bagi manajemen untuk pelaksanaan kegiatan operasi manajemen sehari-hari. Belkaoui (2006) menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan sarana untuk mempertanggungjawabkan apa yang

dilakukan oleh manajer atas sumber daya pemilik. Laporan keuangan merupakan hasil dari suatu aktivitas yang bersifat teknis agar tujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat itu dapat dicapai. Berkaitan dengan itu, maka perlu adanya komunikasi. Menurut Suwardjono (2005:28) menyatakan bahwa efek komunikasi menjadi sasaran penyampaian gagasan atau informasi dari pengirim kepada penerima. Sistem komunikasi dan efek komunikatif dipelajari dalam tiga bidang kajian, salah satunya yaitu semiotika. Semiotika merupakan bidang kajian yang membahas teori umum tentang tanda-tanda (signs) dan simbol-simbol. Terdapat tiga level semiotika, yaitu: sintaktika, semantika, dan pragmatika. Sintaktika berkaitan dengan studi mengenai tanda itu sendiri secara individual maupun kombinasinya, khususnya analisis yang bersifat deskriptif mengenai tanda dan kombinasinya. Semantika adalah studi mengenai hubungan antara tanda dan signifikasi atau maknanya. Pragmatika adalah studi mengenai hubungan antara tanda dan penggunaannya, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan tanda secara konkrit dalam berbagai peristiwa serta efek atau dampaknya terhadap pengguna.

Berkaitan dengan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 pasal 4, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota memiliki fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dan salah satu kewenangannya dalam bidang pengawasan adalah

pengadaan barang (Marlaini dkk., 2018). Sehubungan dengan itu, peran Inspektorat Kabupaten/Kota diperlukan untuk mempersempit ruang gerak pelaku, khususnya yang ingin melakukan kecurangan dalam pengadaan barang/jasa untuk kepentingan pribadinya (Ardiyanti dkk., 2016). Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terdiri dari audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Aparat pengawasan internal pemerintah di daerah adalah Inspektorat Propinsi/Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur/Bupati/Walikota harus memiliki kapabilitas yang memadai, baik dari aspek kelembagaan maupun proses tata kelola pengawasan. Peran inspektorat di daerah sangat penting dalam hal mengawasi kinerja keuangan pemerintah daerah yang terbagi pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar tidak terjadi penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan serta pelaksanaan tugas-tugas di SKPD. Dalam rangka sistem pengendalian internal pemerintah, tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya merupakan bagian dari pemantauan pengendalian intern (Hamzah dkk., 2018).

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kajian Fungsi Inspektorat terkait Pengawasan Internal: Sebuah Pendekatan Semiotika** (Studi pada Inspektorat Kabupaten Jenepono)”

#### **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Adapun fokus penelitian ini dimaksudkan agar pokok permasalahan dapat dijelaskan secara lebih rinci dan menyeluruh dengan tidak mengabaikan maksud

serta tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, fokus utama yang akan dikaji pada penelitian ini membahas mengenai kajian fungsi inspektorat terkait pengawasan internal melalui pendekatan semiotika yang dilakukan di Inspektorat Kabupaten Jeneponto. Semiotika merupakan bidang yang membahas teori umum tentang tanda-tanda dan simbol-simbol dalam bidang linguistika. Terdapat tiga tataran (level) semiotika yaitu sintaktika (logika/ kaidah bahasa), semantika (tanda/simbol), dan pragmatika. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara mendalam dan observasi kepada informan yang dianggap memiliki kapasitas dalam memberikan informasi melalui pendekatan semiotika tentang bagaimana fungsi Inspektorat daerah terkait pengawasan internal dari aspek sintaktika, semantika, dan pragmatika.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) daerah dibutuhkan komitmen mulai dari pimpinan dan seluruh pegawai agar bisa mencapai tujuan bersama dan untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang baik diperlukan SPIP yang handal, transparan, akuntabel dan sesuai ketentuan. Adanya implementasi dari otonomi daerah ini merupakan salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat daerah yang berperan sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP dituntut untuk mampu memberikan nilai tambah dan membantu auditi mengenali resiko-resiko yang akan menghambat perbaikan kinerja audit Pengawasan intern merupakan seluruh proses kegiatan pengawasan, *review*, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan



lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Peran inspektorat di daerah sangat penting dalam hal mengawasi kinerja keuangan pemerintah daerah yang terbagi pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar tidak terjadi penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan serta pelaksanaan tugas-tugas di SKPD. Melalui pendekatan semiotika, Inspektorat daerah dapat lebih memahami tugas dan fungsinya. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dari itu dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan internal Inspektorat daerah dari aspek sintaktika?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan internal Inspektorat daerah dari aspek semantika?
3. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan internal Inspektorat daerah dari aspek pragmatika?

#### **D. *Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu***

Kajian Pustaka atau penelitian terdahulu pada umumnya berisi uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Dalam hal ini, beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah:

Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Abdul Haris dan Heri Kusmanto (2016)	Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai ( <i>Inspection Function of Inspectorate of Serdang Bedagai Regency</i> )	Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan sistem pengawasan yang dilihat dari segi pemeriksaan, pengujian, dan pengusutan sudah berjalan dengan efektif, hal ini dapat dilihat dari segi ketepatan waktu dalam melakukan pengawasan, serta keakuratan data yang dilaporkan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai dengan data yang ada di lapangan.
2.	Manialup, Nangoi, dan Morasa (2017)	Peran Inspektorat dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud	Kesimpulan penelitian ini adalah peran inspektorat dalam pelaksanaan SPIP yaitu dalam hal kepemimpinan, pengawasan intern, konsultan dan penjamin mutu. Kendala-kendala yang mempengaruhi peran Inspektorat dalam pelaksanaan SPIP di Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu belum adanya Peraturan Bupati dan belum membentuk Satuan Tugas SPIP, pemahaman

			SDM akan SPIP masih kurang dan jumlah personil belum memadai, anggaran kegiatan pengawasan kurang memadai, belum ada komitmen bersama dalam melaksanakan SPIP serta penilaian risiko dan pemetaan risiko belum optimal karena keterbatasan waktu.
3.	Marlaini Aliamin, dan Mirna Indriani (2018)	Evaluasi Efektivitas Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Paradigma Baru (Studi Kasus pada Salah Satu Inspektorat di Aceh)	Penggunaan metode, pendekatan, dan fokus audit di Inspektorat saat ini belum secara keseluruhan memenuhi tuntutan paradigma baru bagi peran audit intern yang berfungsi sebagai penjamin mutu ( <i>assurance</i> ) dan konsultansi ( <i>consulting</i> ).
4.	Nurmayani dan Eka Deviani (2018)	Peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Provinsi Lampung	Hasil dari penelitian ini adalah Inspektorat Daerah Provinsi Lampung sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah memiliki peran dalam perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan, dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan,

			<p>pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Daerah di bidang pengawasan. Serta dalam menjalankan tugasnya Inspektorat Provinsi Lampung belum dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugasnya sehingga program pengawasan tidak semuanya dapat ditindaklanjuti.</p>
5.	<p>Sudiran dan Ahmad Jubaidi (2018)</p>	<p>Tinjauan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Berdasarkan Internal <i>Audit Capability Model</i> untuk Mewujudkan Peran yang Efektif di Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur</p>	<p>Kendala-kendala yang dihadapi dalam peningkatan kapabilitas APIP adalah terbatasnya SDM pengawasan sesuai kompetensi yang disyaratkan / bersertifikasi, belum memadainya pengembang profesionalisme auditor, belum di berlakukannya mekanisme pemberian penghargaan yang sehat dan berpola belum dilakukan <i>Quality Assurance and Improvement Program</i> (QAIP) per <i>review</i> intern serta belum memadainya anggaran operasional pengawasan.</p>

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan internal Inspektorat daerah dari aspek sintaktika.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan internal Inspektorat daerah dari aspek semantika.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan internal Inspektorat daerah dari aspek pragmatika.

### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai fungsi Inspektorat terkait pengawasan internal, agar pengawasan dapat berjalan secara optimal. Sebagaimana yang diketahui bahwa untuk melaksanakan tugas pokok, Inspektorat daerah mempunyai fungsi untuk merencanakan program pengawasan, perumusan kebijakan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian dalam tugas pengawasan serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan, perlengkapan, dan peralatan pemerintah kabupaten. Teori yang mendukung penelitian ini ialah *Stewardship Theory*. Teori *stewardship* adalah satu

keadaan di mana manajer sebagai *steward* lebih berfokus pada kepentingan bersama atau tujuan organisasi bukan pada keinginan pribadi (Donaldson dan Davis, 1991). Teori *stewardship* menjelaskan mengenai suatu manajemen yang peduli terhadap tujuan organisasi tersebut dengan membentuk unit audit internal yang dapat memberi nilai tambah dan membantu organisasi mencapai tujuannya. Dimana melalui pendekatan semiotika, Inspektorat dapat lebih memahami tugas dan fungsinya.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai landasan untuk mengetahui tugas dan fungsi inspektorat dalam merencanakan program pengawasan, perumusan kebijakan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian dalam tugas pengawasan serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan, perlengkapan, dan peralatan pemerintah kabupaten. Serta dapat meningkatkan upaya dalam mendorong peningkatan efektivitas pengendalian dan tata kelola organisasi.

## **3. Manfaat Regulasi**

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terdiri dari audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Aparat pengawasan internal pemerintah di daerah adalah Inspektorat Propinsi/Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur/Bupati/Walikota harus memiliki kapabilitas yang memadai, baik dari aspek kelembagaan maupun proses tata kelola pengawasan. Berkaitan dengan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 pasal 4, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota memiliki fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.





## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. *Konsep Semiotika*

Pada masa filsafat Yunani dua ribu tahun yang lalu sudah memikirkan fungsi tanda-tanda dan pada abad pertengahan pengertian serta penggunaan tanda sudah disinggung-singung. Istilah semiotika baru digunakan pada abad 18 yang dicetuskan oleh ahli filsafat kelahiran Jerman bernama Lambert (Zoes, 1991). Istilah semiotika kemudian banyak dibahas secara panjang lebar dan sistematis pada abad 19 oleh beberapa tokoh seperti Roland Barthes, Julia Kristeva, Umberto Eco, Charles Sanders Pierce dan Ferdinand Saussure. Kelahiran semiotika modern mengenal dua tokoh besar dalam penggagas semiotika yaitu Charles Sanders Pierce dan Ferdinand Saussure. Menurut Zoes (1991) menyatakan kedua tokoh tersebut hidup satu zaman namun tidak saling mengenal. Pierce yang memiliki latar belakang ahli logika dan Saussure berlatar belakang linguistik. Memunculkan perbedaan dalam penggunaan istilah. Pierce menggunakan istilah semiotika dan Saussure menggunakan istilah semiologi. Tidak ada perbedaan yang esensial terhadap kedua istilah ini, yang berbeda hanya mengacu pada orientasi pengguna istilah yaitu kubu Pierce dan kubu Saussure. Istilah semiotika lebih populer digunakan oleh banyak pemikir termasuk kubu dari pemikiran Saussure.

Dalam teori komunikasi, semiotik menjadi salah satu kajian yang menjadi tradisi. Tradisi semiotik terdiri atas sekumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda merepresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, perasaan dan kondisi di luar tanda-

tanda itu sendiri (Littlejohn, 2009:53). Semiotik mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti (Kriyantono, 2007:261). Suwardjono (2005) mengartikan semiotika sebagai suatu bidang kajian yang membahas teori umum tentang tanda-tanda (*signs*) dan simbol-simbol dalam bidang linguistika. Dapat disimpulkan bahwa semiotika adalah studi tentang tanda-tanda. Konsep tanda ini untuk melihat bahwa makna muncul ketika ada hubungan atau hubungan antara yang ditandai dan tanda.

Akuntansi keuangan yang dikenal luas sekarang ini dikembangkan atau direkayasa atas dasar premis bahwa investor dan kreditor adalah pihak yang dituju informasi. Efek komunikasi yang ingin dicapai adalah agar pihak yang dituju tersebut bersedia menanamkan dana ke kegiatan ekonomik yang dibutuhkan masyarakat melalui perusahaan. Pesan tersebut disampaikan melalui medium statemen keuangan (Suwardjono, 2005). Dalam ilmu bahasa, sistem komunikasi dan efek komunikatif dipelajari dalam tiga bidang, yaitu semiotika, linguistika, dan logika. Semiotika merupakan bidang yang membahas teori umum tentang tanda-tanda dan simbol-simbol dalam bidang linguistika. Linguistika itu merupakan bidang ilmu bahasa yang membahas fonetik, gramatika, morfologi, dan makna kata atau ungkapan. Logika membahas masalah yang berkaitan dengan validitas penalaran dan penyimpulan. Ketiga bidang ini menjadi teori yang melandasi terciptanya komunikasi yang efektif. Terdapat tiga tataran (*level*) semiotika yaitu sintaktika, semantika, dan pragmatika.

Sintaktika menelaah logika dan kaidah bahasa, yaitu hubungan logis di antara tanda-tanda atau simbol-simbol bahasa (Oktaviani dkk., 2017). Simbol-simbol tersebut (misalnya aset, utang, pendapatan, dan lainnya) harus berkaitan secara logis sehingga informasi semantik dapat dikandung dalam statemen keuangan. Teori sintaktika meliputi pula hubungan antara unsur-unsur yang membentuk struktur pelaporan keuangan atau struktur akuntansi dalam suatu negara yaitu manajemen, entitas pelapor (pelaporan), pemakai informasi, sistem akuntansi, dan pedoman penyusunan pelaporan). Dengan kata lain, dari segi sintaktik, berusaha untuk memberi penjelasan dan penalaran yang melandasi suatu struktur pelaporan keuangan (Suwardjono, 2005). Sintaktika dalam penelitian ini membahas pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat daerah yang memaknai pengawasan dari segi praktisnya saja.

Semantika menelaah hubungan antara tanda atau simbol dan dunia kenyataan (fakta) yang disimbolkannya (Oktaviani dkk., 2017). Teori ini berusaha untuk menjawab apakah elemen-elemen statemen keuangan benar-benar merepresentasi apa yang memang dimaksudkan dan untuk meyakinkan bahwa makna yang terkandung dalam simbol pelaporan tidak disalahartikan oleh pemakai. Jadi, teori semantik berkepentingan dengan perlambangan dan penafsiran objek akuntansi untuk menghasilkan informasi semantik yang bermakna bagi pemakai laporan (Suwardjono, 2005). Semantika dalam penelitian ini memaknai pelaksanaan pengawasan internal dengan realitas yang terjadi pada Inspektorat daerah dari segi standar operasional prosedur pemeriksaan reguler. Pragmatika membahas dan

menguji apakah komunikasi efektif dengan mempelajari ada tidaknya perubahan perilaku penerima (Oktaviani dkk., 2017). Teori pragmatik membahas berbagai hal dan masalah yang berkaitan dengan pengujian kebermanfaatan informasi baik dalam konteks pelaporan keuangan eksternal maupun manajerial (Suwardjono, 2005). Pragmatika dimaknai dengan efek yang ditimbulkan terhadap pengguna.

### **B. Konsep Kejujuran**

Jujur merupakan suatu keadaan seseorang dalam mewujudkan sikap yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi (Novriyansah dkk., 2017). Jujur merupakan karakter yang terbentuk dari sikap amanah. Yaumi (2014) mengungkapkan bahwa amanah adalah bersikap jujur dan dapat diandalkan dalam menjalankan komitmen, tugas, dan kewajiban. Oleh karena itu, menjadi amanah atau dapat dipercaya berarti bersikap jujur. Kesuma (2011) menambahkan bahwa jujur merupakan keputusan seseorang untuk mengungkapkan dalam bentuk perasaan, perkataan, dan perbuatan sesuai dengan realitas yang ada dan tidak memanipulasi dengan berbohong atau menipu untuk keuntungan dirinya. Kejujuran adalah kehati-hatian diri seseorang dalam memegang amanah yang telah dipercayakan oleh orang lain kepada dirinya. Karena itu, kejujuran sesungguhnya berkaitan erat dengan nilai kebenaran, termasuk di dalamnya kemampuan mendengarkan, sebagaimana kemampuan berbicara, serta setiap perilaku yang bisa muncul dari tindakan manusia.

Kejujuran dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa latin yaitu *integer*, *incorruptibility*, yaitu sikap yang teguh mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral.

Pengertian lain dalam bahasa Inggris honest atau jujur, berasal dari bahasa latin, honestus atau honos yang artinya terhormat atau menjadi terhormat. Honest diartikan juga dengan tidak pernah menipu, berbohong atau melawan hukum, atau tidak menyimpang dari prinsip kebenaran (Salahuddin dan Irwanto, 2013). Jujur adalah perilaku pada upaya yang menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan. Sifat manusia cenderung memilih pengaruh yang positif, karena tidak ada seorangpun yang mau celaka atau menyimpang dari perintah Allah atau menyengsarakan dirinya. Namun tidak boleh dilupakan bahwa sifat manusia yang lemah, lalai dan lupa, akan bisa melemahkan budaya kejujuran, bahkan hilang (Muhasim, 2017).

### **C. *Stewardship Theory***

Teori *stewardship* adalah satu keadaan di mana manajer sebagai *steward* lebih berfokus pada kepentingan bersama atau tujuan organisasi bukan pada keinginan pribadi (Donaldson dan Davis, 1991). Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok yang pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu dalam kelompok organisasi. Teori *stewardship* menjelaskan mengenai suatu manajemen yang peduli terhadap tujuan organisasi tersebut dengan membentuk unit audit internal yang dapat memberi nilai tambah dan membantu organisasi mencapai tujuannya. Aktivitas audit internal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu independensi, profesionalisme, kompetensi, kualitas audit, dan dukungan manajemen.

Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuan, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses governance (Setianto, 2004). Efektivitas audit internal adalah pencapaian tujuan dan sasaran fungsi audit internal (Dittenhofer, 2001). Tujuan akhir dari fungsi audit internal adalah penciptaan nilai tambah bagi organisasi (Mihret dan Yismaw, 2007). Fungsi audit internal yang efektif bertujuan untuk mencapai tujuan utamanya, yang terdiri dari menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kinerja organisasi (Huong, 2018). Independensi adalah bebas dari situasi yang mengancam obyektivitasnya. Obyektivitas merupakan sikap mental yang tidak memihak yang memungkinkan auditor internal melaksanakan tugas sedemikian rupa sehingga mereka memiliki keyakinan yang jujur atas hasil kerja mereka tanpa kompromi dalam kualitas. Independensi akan meningkat jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap pimpinan dan dewan pengawas organisasi (Setianto, 2004).

#### **D. Konsep Pengawasan**

Pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi manajemen. Konsep mengenai fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Perancis bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20. Beliau menyebutkan lima fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan penilaian (Siagian, 2005). Namun, dalam penelitian ini hanya berfokus pada fungsi pengawasan. Henry Fayol dalam bukunya "*General and Industrial Administration*" menyatakan pengawasan terdiri atas tindakan

meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Dari pengertian tersebut, pengawasan mempunyai kewenangan yang lebih "*forcefull*" terhadap objek yang dikendalikan, atau objek yang diawasi. Dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan konkrit itu sudah terkandung didalamnya, sedangkan dalam pengertian pengawasan tindakan korektif merupakan proses kelanjutan (Subroto, 2009).

Pelaksanaan pengawasan yang efektif merupakan salah satu refleksi dari efektivitas manajerial seorang pemimpin. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa setiap orang yang menduduki jabatan manajerial, mulai dari manajer paling rendah hingga pada manajer puncak, selalu menginginkan agar baginya tersedia suatu sistem informasi yang andal agar pelaksanaan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya benar-benar terlaksana sesuai dengan hal-hal yang telah ditetapkan dalam rencana. Dilihat dari segi pengawasan, sebagian besar kegiatan yang diselenggarakan oleh berbagai satuan kerja penunjang dalam organisasi sebenarnya dilakukan dalam rangka penyediaan informasi, seperti informasi keuangan, informasi kepegawaian, informasi logistik, dan informasi ketatausahaan, sebagai bahan untuk memperlancar jalannya pengawasan (Siagian 2005). Menurut Siagian (2005) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan, sebuah informasi bukan saja harus dapat dipercaya, mutakhir, dan terolah dengan rapi, tetapi sesuai dengan kebutuhan pemakainya agar benar-benar bermanfaat dan penyediaan informasi berjalan lancar. Artinya, informasi yang bersifat umum memang tetap ada



manfaatnya, akan tetapi informasi yang spesifik disediakan untuk kepentingan pengawasanlah yang akan lebih bermanfaat dalam usaha meningkatkan seluruh kegiatan pengawasan yang akan dijalankan.

#### **E. Fungsi Inspektorat**

Penyelenggaraan pengawasan merupakan implementasi kebijakan di bidang pengawasan. Implementasi kebijakan merupakan faktor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan, tanpa diimplementasikan kebijakan publik hanya akan menjadi dokumentasi belaka. Hal lain yang juga penting dalam implementasi kebijakan adalah tidak semua kebijakan yang telah diambil dan disahkan oleh pemerintah dengan sendirinya akan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan itu. Fungsi Inspektorat ialah melakukan pengawasan dan audit keuangan pada setiap kegiatan operasional lembaga pemerintah (Umar dkk., 2018). Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengawasan itu sendiri (Marlaini dan Indriani, 2018). Menurut Lusiana dkk. (2017) bahwa fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan sangatlah penting baik sebagai *early warning system* apabila terdapat penyimpangan maupun sebagai fungsi pembinaan bagi satuan kerja di setiap unit pemerintahan. Hakekat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas suatu organisasi (Hamzah dkk., 2018).

Inspektorat daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran yang sangat penting dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam APBD (Nurmayani dan Deviani, 2018). Menurut Hamzah (2018) bahwa peran Inspektorat di daerah sangat penting dalam hal mengawasi kinerja keuangan pemerintah daerah yang terbagi pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar tidak terjadi penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan serta pelaksanaan tugas-tugas di SKPD.

Pengawasan intern pemerintah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang terdiri dari audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Untuk dapat menjalankan tugas tersebut, maka unit aparat pengawasan intern pemerintah harus memiliki kapabilitas yang memadai, baik dari aspek kelembagaan maupun proses bisnis/tata kelola pengawasan. Kapabilitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang (Sudiran dan Jubaidi, 2018). Menurut Amir (2011:86) menjelaskan bahwa kapabilitas ialah kemampuan mengeksploitasi secara baik sumber daya yang dimiliki dalam diri maupun di dalam

organisasi, serta potensi diri untuk menjalankan aktivitas tertentu ataupun serangkaian aktivitas. Sesuai dengan ajaran Islam yang menjelaskan bahwa pekerjaan itu harus dilakukan berdasarkan kesadaran dan pengetahuan yang memadai. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra'/17: 36, disebutkan:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

“ Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”

Selain kapabilitas, aparatur Inspektorat juga harus memiliki sikap profesionalisme agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Profesionalisme adalah perilaku bertanggungjawab yang dimiliki oleh seseorang terhadap apa yang telah dikerjakan (Setiawan, 2018). Secara ideal, Islam sangat mendorong tumbuhnya sikap profesionalisme, baik dalam kerja untuk orientasi duniawi maupun ukhrawi. Amal perbuatan harus dilakukan seoptimal mungkin (sebagai amal shalih) di dunia maupun amal perbuatan untuk tujuan akhirat. Semuanya itu merupakan ibadah kepada Allah, maka profesionalisme adalah pelaksanaan suatu amal atau pekerjaan dengan kualitas kerja yang tinggi dengan mutu produktivitas yang tinggi pula. Sesuai hadits Rasulullah SAW. banyak yang mengarahkan umat manusia agar mengarah kepada profesionalisme sesuai dengan pengarah dan bimbingan dari Al-Qur'an seperti yang disebutkan di atas, diantaranya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ (رواه الطبرني والبيهقي)

Artinya:

Dari Aisyah r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional”. (HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334).

Inspektorat yang merupakan lembaga perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah (bupati) dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dibidang pengawasan dalam wilayah dan jajaran pemerintahan, yang secara organisator dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab kepada kepala daerah (bupati). Inspektorat daerah melakukan, pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dimana SKPD itu sendiri terkadang masih belum bekerja secara maksimal sebagaimana mestinya (Nurmayani dan Deviani, 2018). Kedudukan Inspektorat kabupaten yang demikian, maka independensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasannya akan sulit dilakukan (Setiawan dan Putro, 2013). Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut inspektorat kabupaten mempunyai fungsi untuk merencanakan program pengawasan, perumusan kebijakan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian dalam tugas pengawasan serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan, perlengkapan, dan peralatan pemerintah kabupaten (Haris dan Kusmanto, 2016).

#### **F. *Independensi***

Independensi merupakan sikap mental yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mudah dipengaruhi dalam melaksanakan tugasnya (Agusti dan Pertiwi, 2013). Independensi adalah keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain (Mulyadi dan Puradireja, 2002:26).

Dalam Dewan Standard Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui SPAP (2001:220.1) menyatakan bahwa: “auditor diharuskan bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan didalam hal ia berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingann siapapun sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.” Unsur-unsur mengenai independensi adalah suatu sikap mental yang terdapat pada akuntan publik yang jujur, tidak memihak pada suatu kepentingan tertentu dengan keahlian mengenai objek yang diperiksanya, yang memungkinkan ia bersikap jujur, bertindak bebas dari pengaruh, bujukan, pengendalian pihak lain dalam melakukan perencanaan, pemeriksaan dan pelaporannya yang berdasarkan bukti yang ada dari temuan-temuannya. Sehingga mutlak bagi seorang auditor untuk tetap bersikap independen dalam semua hal yang berkaitan dengan tugas mengaudit laporan keuangan (Jesika dkk., 2015).

Seorang auditor yang mempertahankan independensi tidak akan terpengaruh dan dipengaruhi oleh berbagai kekuatan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang ditemukan dalam pemeriksaannya (Rofingatun, 2018). Dalam melaksanakan sikap independennya seorang auditor tidak hanya melaksanakannya dalam pekerjaan lapangan semata melainkan juga dalam mengatur perencanaan atas aktivitas yang akan dilakukan

dalam proses audit tersebut (Haryanto, 2018). Semakin independen seorang auditor maka semakin baik kualitas audit. Oleh karena itu, ia tidak dibenarkan memihak kepada siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang dimilikinya, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat diperlukan untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Menurut Sawyer's (2012) menyatakan bahwa aktivitas audit internal akan tetap bebas dari campur tangan setiap elemen dalam organisasi, termasuk hal-hal seleksi audit, ruang lingkup, prosedur, frekuensi, waktu, atau isi laporan untuk mengizinkan pemeliharaan sikap mental yang diperlukan independen dan obyektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi independensi internal auditor, yaitu: konflik peran, ambiguitas peran, status organisasi, dukungan manajemen, dan praktek penggunaan fungsi internal audit sebagai batu loncatan bagi karir masa depan (Haryanto dan Susilowati, 2018).

#### **G. *Profesionalisme***

Profesionalisme dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar pekerjaan yang berlaku. Profesionalisme Auditor Internal merupakan sikap dan juga perilaku dari auditor itu sendiri dalam melaksanakan profesinya dengan kesungguhan dan juga tanggung jawab agar dapat mencapai kinerjanya dengan baik (Haryanto dan Susilawati, 2018). Apabila seorang auditor tidak memiliki atau telah kehilangan sikap profesionalismenya sebagai seorang auditor maka sudah dapat diyakini bahwa auditor tersebut tidak akan dapat menghasilkan hasil kinerja yang memuaskan dan dengan baik, maka dengan begitu kepercayaan dari masyarakat akan hilang begitu

saja terhadap auditor tersebut. Oleh sebab itu sangatlah diperlukan sikap profesionalisme tersebut dalam menyelesaikan tugas-tugas dengan tepat waktu (Wulandari dan Suputra, 2018). Profesionalisme merupakan sikap bertanggungjawab terhadap apa yang telah ditugaskan kepadanya. Profesionalisme adalah suatu tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar dari memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar dari memenuhi Undang-Undang dan peraturan masyarakat (Susilo dan Widyastuti, 2015).

Sikap profesionalisme akan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang dimilikinya yaitu berdasarkan yang pertama pengabdian pada profesi, auditor yang mengabdikan kepada profesinya akan melakukan totalitas kerja dimana dengan totalitas ini dia akan lebih hati-hati dan bijaksana dalam melakukan audit sehingga dapat menghasilkan audit yang berkualitas. Jadi apabila semakin tinggi pengabdian pada profesi akan semakin tinggi profesionalisme auditor (Agusti dan Pertiwi, 2013). Seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan. Seorang auditor yang memiliki sikap profesionalisme dapat dipercaya dan diandalkan dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga dapat berjalan lancar, baik dan mendatangkan hasil yang diharapkan (Wulandari dan Suputra, 2018).



#### **H. Fungsi Inspektorat Daerah sebagai Pengawas Internal**

Pengawasan Intern Pemerintah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang terdiri dari audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Untuk dapat menjalankan tugas tersebut, maka unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus memiliki kapabilitas yang memadai, baik dari aspek kelembagaan maupun proses bisnis/tata kelola pengawasan (Sudiran dan Jubaidi, 2018). Pengawasan intern dalam hal ini Inspektorat, dituntut untuk lebih meningkatkan dan berperan aktif dalam hal mengawasi kinerja keuangan SKPD. (Hamzah dkk., 2018). Adapun menurut Umar dkk. (2018) menyatakan bahwa fungsi Inspektorat ialah melakukan pengawasan dan audit keuangan pada setiap kegiatan operasional lembaga pemerintah. Hakekat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas suatu organisasi (Mahanani, 2018). Pengawasan berbasis pada standar kinerja dan perencanaan karena perencanaan dan standar kinerja inilah yang menjadi pedoman untuk melaksanakan pengawasan (Trisnawati dkk., 2018).

Para aparatur inspektorat atau dapat juga dikatakan sebagai auditor internal tersebut harus mengevaluasi berbagai alternatif informasi untuk memenuhi standar lapangan yaitu bukti audit yang kompeten melalui inspeksi, pengamatan, ataupun jenis pemeriksaan lainnya sesuai dengan standar pemeriksaan yang baku (Dewa dkk., 2015). Inspektorat sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk menjadi auditor



internal dalam pemerintahan daerah harus memiliki kompleksitas keahlian yang baik sehingga dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Namun dalam praktiknya, kompetensi dan etika profesionalisme yang harusnya ditonjolkan oleh para aparat inspektorat sering akan berbenturan dengan berbagai kepentingan baik itu dengan SKPD yang diawasi dan diperiksa maupun kepentingan-kepentingan lain dari oknum pejabat pemerintahan yang tidak bertanggungjawab, sehingga pada akhirnya kualitas audit yang dihasilkan lagi-lagi tidak maksimal (Abdul dkk., 2016).

Pengendalian internal dilakukan untuk melindungi kekayaan organisasi dengan cara meminimalisasi penyimpangan dan pemborosan serta memaksimalkan efisiensi, ekonomis serta efektivitas kinerja organisasi atau instansi pemerintah (Sihite dan Holiawati, 2017). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan UU No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Adanya aturan ini maka pemerintahan pusat atau daerah dituntut untuk dapat mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan daerah. Rendahnya kualitas laporan keuangan, secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintahan, penyelenggaraan sistem pengendalian internal yang belum memadai dan kurangnya kompetensi staf akuntansi yang ada (Sihite dan Holiawati, 2017).

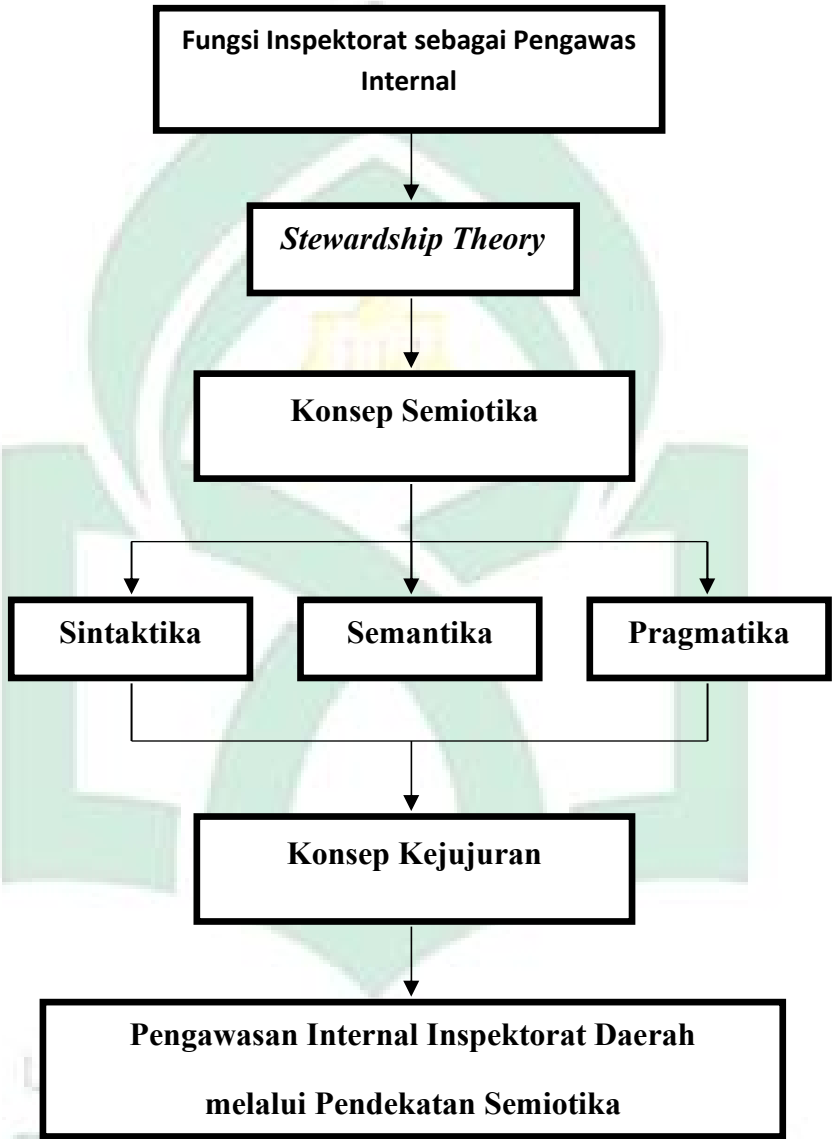
## **I. Rerangka Pikir**

Penyelenggaraan pengawasan merupakan implementasi kebijakan di bidang pengawasan. Fungsi Inspektorat ialah untuk merencanakan program pengawasan, perumusan kebijakan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian dalam tugas pengawasan serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan, perlengkapan, dan peralatan pemerintah kabupaten. Adanya implementasi dari otonomi daerah ini merupakan salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Pengawasan intern merupakan seluruh proses kegiatan pengawasan, *review*, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Melalui pendekatan semiotika, Inspektorat dapat lebih memahami dan mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan rerangka pemikiran sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

Gambar 2.1

Rerangka Pikir



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

###### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bungin (2009:68) bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakteristik, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. Fokus dari penelitian kualitatif adalah menjelaskan bagaimana gejala sosial dibentuk dan diberi makna. Rancangan penelitian kualitatif, fokus kajian penelitian atau pokok permasalahan yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas. Analisis data kualitatif digunakan bila data-data yang terkumpul dalam riset adalah data kualitatif. Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi (Abdullah, 2015). Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena ingin menggali informasi dari para informan secara mendalam tentang pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat daerah menggunakan pendekatan semiotika.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Inspektorat Kabupaten Jeneponto yang beralamat di Empoang, Binamu Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan 92311, Indonesia.

### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan semiotika. Metode semiotika pada dasarnya bersifat *critical paradigm* dalam melihat fenomena. Dipilihnya paradigma *critical* dalam akuntansi menurut Suwardjono (2005) adalah karena mempunyai tujuan ganda, yaitu memahami suatu praktik dimana ia diterapkan dan sekaligus berusaha untuk menemukan suatu pemecahan ke arah penyempurnaan praktik itu sendiri. Semiotika merupakan bidang kajian yang membahas teori umum tentang tanda-tanda (signs) dan simbol-simbol dalam bidang linguistika. Dalam semiotika terdapat tiga tataran (level) yaitu sintaktika, semantika dan pragmatika. Sintaktika menelaah logika dan kaidah bahasa. Semantika menelaah hubungan antara tanda atau simbol dan dunia kenyataan (fakta) yang disimbolkannya. Pragmatika membahas dan menguji apakah komunikasi efektif dengan mempelajari ada tidaknya perubahan perilaku penerima (Suwardjono, 2005:29). Sebagaimana dalam penelitian ini menginterpretasi apa yang dipahami aparaturnya pemerintah tentang fungsi inspektorat terkait pengawasan internal, yang di mana untuk mengklasifikasikan implementasinya pada aparaturnya pemerintah maka dibutuhkan pedoman dalam pemaknaan melalui pendekatan semiotika yang berhubungan dengan fungsi Inspektorat terkait pengawasan internal.

### **C. Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk informasi, gambaran umum instansi atau organisasi, pelaksanaan dan informasi lain yang digunakan. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah para aparatur pemerintah yang bersangkutan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan aparatur pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, data lain yang ditemukan langsung oleh peneliti di lokasi, seperti dokumentasi berupa foto.
2. Data Sekunder, yaitu data yang telah ada dan tersedia, berupa data atau dokumen di luar data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur, jurnal-jurnal dan sumber lain yang berhubungan erat dengan masalah penelitian. Data yang diperoleh mengenai sejarah dan struktur organisasi atau gambaran umum instansi, standar operasional prosedur penelitian dan teori-teori yang ada hubungannya dengan penelitian.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat. Untuk menganalisis dan menginterpretasikan data dengan baik, maka diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapat mampu mendeskripsikan situasi objek yang sedang diteliti dengan benar. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### 1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2014:231). Wawancara yang dilakukan adalah komunikasi secara langsung antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan secara lisan dengan informan yang menjawab pertanyaan secara langsung. Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap berkompeten dan mewakili.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai objek penelitian (Sugiyono, 2005:240). Dokumentasi bermanfaat sebagai penyedia data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data ini juga berupa data-data sekunder yang berupa dokumen-dokumen atau berupa program-program yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Jeneponto.

### 3. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dengan menggunakan referensi dari buku, jurnal, PSAP dan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan konsep dan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang penelitian.

#### 4. *Internet Search*

Internet searching merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori berkaitan masalah yang diteliti.

#### **E. *Instrumen Penelitian***

Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat, dilakukan wawancara secara mendalam, terhadap informan-informan yang dijadikan sumber informasi. Sedangkan informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang fungsi inspektorat sebagai pengawas internal. Adapun instrumen penelitian yang digunakan berupa alat penunjang yang dapat mengukur ataupun menggambarkan fenomena yang diamati. Adapun alat yang dapat digunakan dalam instrumen penelitian yaitu:

1. *Handphone*
2. Laptop
3. Alat Tulis
4. Buku Catatan
5. Daftar Pertanyaan Wawancara
6. Buku, Jurnal, dan referensi lainnya.

#### **F. *Teknik Analisis Data***

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam



penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Proses analisis data dilakukan sejak pengumpulan data sampai selesainya proses pengumpulan data tersebut. Adapun proses-proses tersebut dapat dijelaskan ke dalam tiga tahap berikut:

1) Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan selama penelitian berlangsung. Reduksi data dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian dari berbagai literatur yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah. Data yang relevan dianalisis secara cermat, sedangkan yang kurang relevan disisihkan.

2) Penyajian data

Langkah kedua adalah penyajian data yang digambarkan dengan sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Diawali dengan menjelaskan rumusan masalah dengan persepsi penulis sebagai pengantar untuk menyinggung persepsi informan mengenai pertanyaan yang diajukan. Kemudian data yang di

peroleh yang berhubungan dengan rumusan masalah dijelaskan terlebih dahulu kemudian menghubungkannya dengan teori untuk bisa menjawab rumusan masalah.

### 3) Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis yaitu penarikan dan verifikasi kesimpulan atas data yang dianalisis agar lebih rinci. Dari pengumpulan data dan analisa yang telah dilakukan, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya dalam proses penelitian, mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, dan implikasi positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini.

### **G. Informan Penelitian**

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam desain penelitian ini, peneliti melakukan suatu penelitian dengan pendekatan semiotika melalui paradigma interpretif. Paradigma interpretif merupakan paradigma yang lebih menekankan makna atau interpretasi seseorang terhadap sebuah simbol. Semiotika merupakan bidang kajian yang membahas teori umum tentang tanda-tanda (signs) dan simbol-simbol dalam bidang linguistika. Dalam semiotika terdapat tiga tataran (level) yaitu sintaktika, semantika dan pragmatika.

Subjek penelitian merupakan suatu benda, manusia, maupun lembaga yang akan diteliti dimana di dalam dirinya mengandung hal-hal terkait masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Subjek penelitian merupakan keseluruhan objek yang terdapat

beberapa narasumber atau informan yang nantinya akan memberikan informasi tentang masalah yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam buku Metode Penelitian Ilmu Sosial, informan sebagai orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti, yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Inspektur Kabupaten
- 2) Inspektur Pembantu Wilayah
- 3) Pejabat Fungsional Auditor

#### **H. Uji Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data maka digunakan metode triangulasi data. Triangulasi digunakan dalam penelitian ini untuk menguji derajat kepercayaan. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Paranoan, 2015). Triangulasi meliputi empat hal, yaitu: triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber dan triangulasi teori. Namun, peneliti hanya menggunakan tiga dari empat jenis triangulasi untuk menyelaraskan dengan penelitian ini, yaitu:

##### **1. Triangulasi Metode**

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode dokumentasi dan wawancara yang berkaitan dengan penelitian.

## 2. Triangulasi sumber data

Berarti menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Selain melalui sumber data utama yaitu wawancara, peneliti bisa menggunakan sumber data pendukung lainnya seperti dokumen yang ditunjukkan informan sebagai bukti sehingga data/keterangan dari informan lebih akurat.

## 3. Triangulasi teori

Merupakan hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan. Triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman apabila peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Objek Penelitian***

##### **1. Pemerintah Kabupaten Jeneponto**

###### **a) Sejarah Kabupaten Jeneponto**

Kabupaten Jeneponto yang berdiri pada tanggal 1 Mei 1959, berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 menetapkan terbentuknya Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, dan terpisahnya Takalar dari Jeneponto. Lahirnya Undang Undang No. 29 Tahun 1959, ditandai dengan diangkatnya kembali raja Binamu setelah berhasil melawan penjajah Belanda. Kemudian tahun 1863, adalah tahun yang bersejarah yaitu lahirnya Afdeling Negeri- negeri Turatea setelah diturunkan oleh pemerintah Belanda dan keluarnya Laikang sebagai konfederasi Binamu. Tanggal 20 Mei 1946, adalah simbol patriotisme Raja Binamu (Mattewakkang Dg Raja) yang meletakkan jabatan sebagai raja yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda.

###### **b) Pemerintahan**

Pemerintahan daerah Jeneponto mencakup 113 desa/kelurahan dengan rincian 82 desa dan 31 kelurahan. ditinjau dari status desa yang tertinggal, masih banyak di jumpai desa yang tertinggal yaitu sebanyak 39 desa, sisanya yang lain yaitu sebanyak 42 desa tidak tertinggal lagi.pada tahun 2017 tanah negara seluas 879,80 ha telah disertifikatkan. sedangkan untuk pendaftaran hak pencatatan tanah di jeneponto

meningkat menjadi 5.082. diantaranya pemberian hak 3.800, hak dana bangunan 305, hak pakai 67, pemisahan 873, dan sertifikat pengganti 7.

**c) Visi dan Misi**

Visi Kabupaten Jeneponto periode 2018-2023: “Jeneponto **SMART** (Berdaya Saing, Maju, Religius, dan Berkelanjutan).” Adapun Misi Kabupaten Jeneponto, yaitu:

- 1) Mengakselerasi perbaikan indeks pembangunan manusia;
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- 3) Mewujudkan peradaban birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan;
- 4) Melaksanakan pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur wilayah secara merata;
- 5) Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya daerah dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan investasi yang berkeadilan;
- 6) Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel;
- 7) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan nilai-nilai budaya; serta
- 8) Menegakkan supremasi hukum, keamanan dan ketertiban.

## **2. Inspektorat Kabupaten Jeneponto**

Objek pada penelitian ini adalah Inspektorat Kabupaten Jeneponto. Inspektorat Kabupaten Jeneponto yang baru dibentuk Tahun 2008 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting dan strategis dalam pengelolaan pemerintahan dan pengembangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, Inspektorat selaku penanggung jawab utama, penyelenggaraan pembangunan dibidang pengawasan, perlu menyusun rencana strategis yang akan dijadikan pedoman di dalam melaksanakan tugas pokok lima tahun kedepan.

Inspektorat merupakan instansi pemerintah yang memiliki fungsi sebagai lembaga pengawasan di daerah. Inspektorat daerah merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Inspektorat daerah memiliki fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah di bidang pengawasan.

### **a) Dasar Hukum Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto disebutkan bahwa Inspektorat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan dibidang pengawasan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan

pembantuan. Penyusunan Daerah tersebut, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**b) Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Adapun kedudukan, tugas, dan fungsi Inspektorat Kabupaten, adalah sebagai berikut.

- 1) Inspektorat Kabupaten merupakan penunjang urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- 2) Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- 4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan;
  - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;



- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pengawasan;
- e. Penyelenggaran *monitoring* dan evaluasi di bidang pengawasan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

(Sumber: <https://jenepontokab.go.id/unit-kerja/inspektorat#>)

### c) Struktur Organisasi

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa, serta melaksanakan ketatausahaan Inspektorat. Berdasarkan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 20 tahun 2016, susunan struktur organisasi inspektorat kabupaten terdiri dari:

#### 1) Inspektur;

Bertugas Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati, secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

#### 2) Sekretaris;

Sekretaris mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat.

Terdiri atas:

a. Kasubag Perencanaan

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan.

b. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan evaluasi dan pelaporan.

c. Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan.

3) Inspektur Pembantu Wilayah I;

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Inspektur dibidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerjanya.

Terdiri atas:

a. Pejabat Fungsional Auditor (PFA)

Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintah di daerah.

b. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan teknis urusan di daerah di luar pengawasan keuangan.

4) Inspektur Pembantu Wilayah II;

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Inspektur dibidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerjanya.

Terdiri atas:

a. Pejabat Fungsional Auditor (PFA)

Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintah di daerah.

b. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan teknis urusan di daerah di luar pengawasan keuangan.

5) Inspektur Pembantu Wilayah III;

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Inspektur dibidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerjanya.

Terdiri atas:

a. Pejabat Fungsional Auditor (PFA)

Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintah di daerah.

b. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan teknis urusan di daerah di luar pengawasan keuangan.

6) Inspektur Pembantu Wilayah IV;

Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Inspektur dibidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerjanya.

Terdiri atas:

a. Pejabat Fungsional Auditor (PFA)

Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintah di daerah.

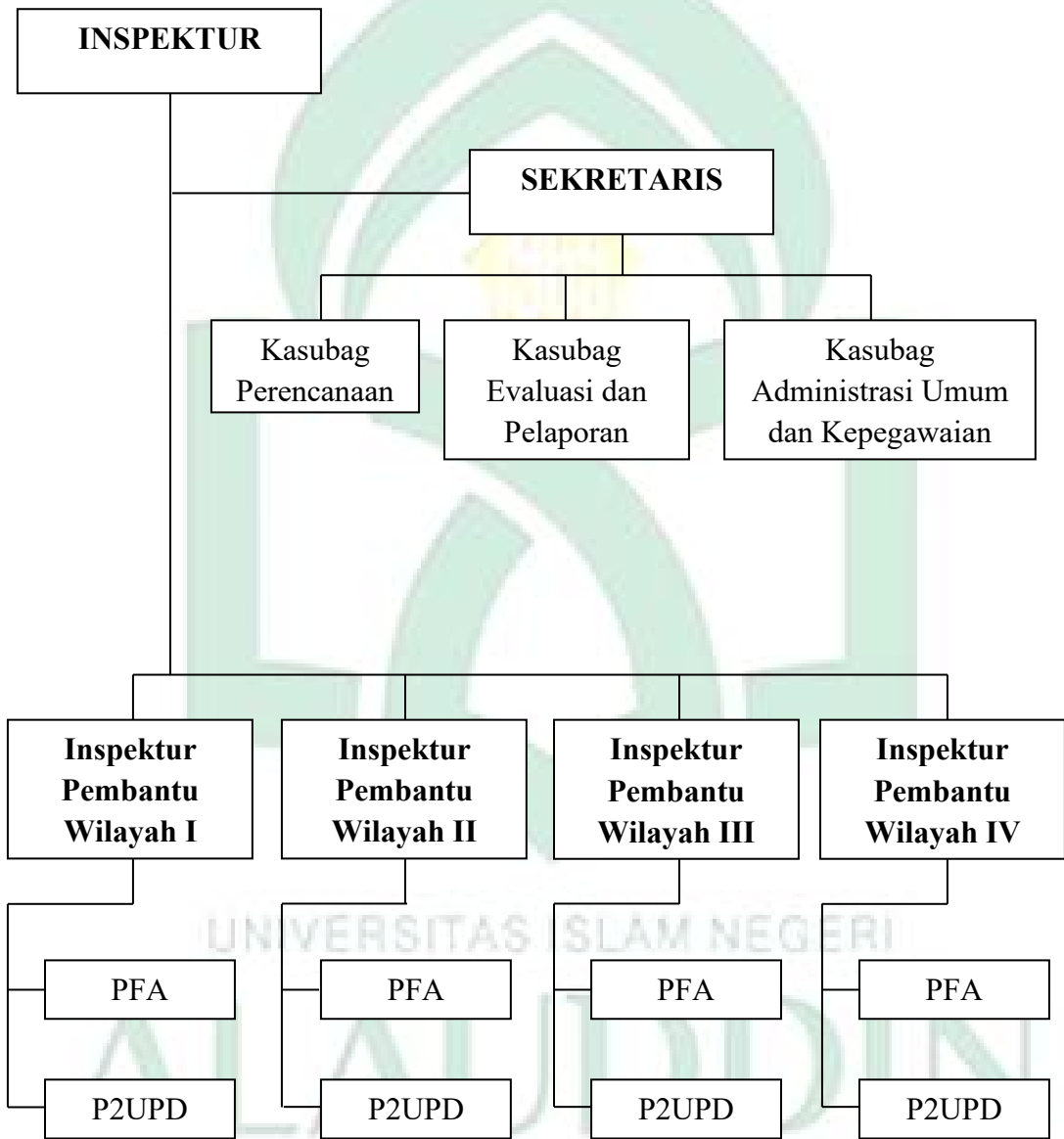
b. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan teknis urusan di daerah di luar pengawasan keuangan.

Gambar 4.1

STRUKTUR ORGANISASI

INSPEKTORAT KABUPATEN JENEPONTO



Sumber: Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 20 Tahun 2016

## ***B. Hasil Penelitian dan Pembahasan***

### **1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Inspektorat Daerah dari Aspek Sintaktika**

Unsur pengawas pada kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan kementerian ialah Inspektorat jenderal. Inspektorat jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri (Nurmayani dan Deviani, 2018). Badan pengawasan daerah disebut inspektorat kabupaten. Inspektorat kabupaten merupakan unsur pengawasan daerah yang dipimpin oleh inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala pemerintah (bupati). Penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih ditujukan dalam meningkatkan kinerja pembangunan di setiap sektor. Salah satu cara yang dilakukan dalam pencapaian kinerja pembangunan adalah melalui pengawasan dimana fungsi dan peran pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan apabila aktivitas yang dilakukan oleh aparat pemerintahan daerah telah sesuai dengan yang direncanakan, dan selain itu dilakukan tindakan korektif dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Badan pengawasan daerah merupakan instansi dari badan pengawasan yang ditugaskan di kabupaten sebagai pengawas umum. Perlu adanya mekanisme kerja dalam melakukan pengawasan baik itu tugas-tugas secara administratif maupun secara operasional.

Peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) di Indonesia merupakan bagian dari implementasi sistem pengendalian intern pemerintah, khususnya dalam rangka menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang positif dan

kondusif. Inspektorat daerah sebagai APIP memiliki peran untuk memastikan penyelenggaraan SPIP dipemerintah daerah sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan atau pedoman serta melakukan pemantauan secara berkala. Fungsi dan peran kantor Inspektorat adalah perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan administrasi, penyusunan laporan hasil pengawasan, pengelolaan barang milik, pengawasan atas pelaksanaan tugas, pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh bupati, serta penyampaian laporan hasil pengawasan, evaluasi, saran dan pertimbangan kepada bupati. Salah satu instansi yang memiliki wewenang dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dilingkungan Kabupaten Jeneponto adalah Inspektorat Kabupaten Jeneponto. Hasil wawancara dengan Inspektur (Kepala Dinas) Inspektorat Kabupaten Jeneponto;

“ Inspektorat ini merupakan aparat pengawas intern pemerintah (APIP) di Kabupaten yang memiliki fungsi dalam hal pengawasan, baik itu pengawasan khusus maupun pengawasan berkala yang dilaksanakan setiap tahun agar tercapai pemerintahan yang baik dan bersih.”

Pernyataan yang kurang lebih sama juga dituturkan oleh Inspektur Pembantu

Wilayah Inspektorat Kabupaten Jeneponto:

“ Inspektorat merupakan salah satu lembaga APIP yang dimana memiliki fungsi dalam bidang pengawasan. Pengawasan ini tidak lain dilakukan sebagai wujud pencegahan dan pembinaan kepada instansi-instansi dan lembaga lainnya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan inspektur kabupaten dan inspektur pembantu wilayah, Inspektorat Kabupaten Jeneponto sebagai aparat pengawas intern pemerintah (APIP) diberi tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap



penyelenggaraan pemerintahan daerah, agar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien dan efektif serta ekonomis (Safwan dkk., 2019). Hasil wawancara yang dituturkan Bapak Hasri Sakti selaku Inspektur Pembantu Wilayah:

“Tentunya tujuan pengawasan itu sendiri untuk menghindari dan mencegah penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi terhadap pelaksanaan program-program pemerintahan baik dalam tingkatan SKPD, kecamatan, kelurahan maupun desa.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan inspektur pembantu wilayah, kontrol atau pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu upaya atau tindakan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan. Inspektorat sebagai APIP di daerah dituntut memainkan peran untuk mengontrol dan mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Agar arah dan sasaran pelaksanaan otonomi daerah dapat terwujud sebagaimana mestinya (Safwan dkk., 2019).

Peran Inspektorat Kabupaten Jeneponto sebagai pengawas internal dilingkungan Kabupaten Jeneponto memiliki kepentingan untuk menyampaikan suatu informasi terhadap pengguna. Informasi tersebut mencakup simbol-simbol yang diungkapkan dengan bahasa yang tepat. Semiotika merupakan salah satu bidang kajian yang membahas teori mengenai tanda atau simbol dalam bidang bahasa. Simbol atau tanda pada Inspektorat Kabupaten Jeneponto dalam kegiatan pengawasan bisa didapatkan dalam standar operasional prosedur pemeriksaan reguler. Dimana terdapat tiga tahap dalam standar tersebut, yaitu: persiapan dan

perencanaan; pelaksanaan penugasan dan pemeriksaan; serta pelaporan hasil penugasan.

Pada tataran sintaktik, standar operasional prosedur pemeriksaan reguler pada Inspektorat Kabupaten Jeneponto merupakan suatu tindakan dalam pengawasan internal pada tataran pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat daerah mempunyai fungsi untuk merencanakan program pengawasan, perumusan kebijakan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian dalam tugas pengawasan serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan, perlengkapan, dan peralatan pemerintah kabupaten. Hasil wawancara dengan Bapak Maskur, S.Ag., M.H. selaku Inspektur Kabupaten:

“ Menurut saya, pengawasan internal merupakan suatu upaya dalam pemerintahan agar kinerja dan tujuan dari pemerintah daerah dapat tercapai. Karena dengan adanya pengawasan ini, maka kita dapat mengetahui apa-apa saja yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan terhadap program-program pemerintahan yang ada. Inspektorat Kabupaten Jeneponto ini merupakan APIP dilingkungan Kabupaten Jeneponto yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal jalannya program pemerintahan. Dan pelaksanaan pengawasan yang kami lakukan telah tertuang dalam SOP pemeriksaan reguler.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan inspektur kabupaten, pengawasan internal bertujuan menilai sistem pengendalian manajemen, efisien dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka perbaikan dan atau peningkatan kinerja inspektorat jendral (Mifti dkk., 2009). Inspektorat Kabupaten Jeneponto menyelenggarakan fungsi sebagai pengawas internal pemerintahan. Untuk menciptakan pengawasan yang baik Inspektorat Kabupaten Jeneponto telah merancang prosedur pengawasan yang baik

dan terstruktur yang telah tertuang dalam Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Reguler. Inspektorat tidak lain menekankan pada perencanaan program pengawasan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan, serta pertanggungjawaban hasil pengawasan. Pengawasan internal merupakan upaya untuk mendorong peningkatan efektivitas pengendalian dan tata kelola organisasi. Inspektorat daerah mempunyai posisi yang sangat strategis terutama dalam hal pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintahan.

Inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas dalam pelaksanaan program-program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari segi fungsi-fungsi manajemen, inspektorat daerah mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi perencanaan. Konsisten dengan konsep pengawasan, Henry Fayol dalam bukunya *“General and Industrial Administration”* menyatakan pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan (Subroto, 2009). Pelaksanaan pengawasan yang efektif merupakan salah satu refleksi dari efektivitas seorang pemimpin. Konsisten dengan *stewardship theory* (Donaldson and Davis, 1991) yang mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok yang pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu dalam kelompok organisasi. Tentunya setiap pemimpin selalu menginginkan agar baginya tersedia suatu sistem informasi

yang andal agar pelaksanaan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya benar-benar terlaksana sesuai dengan hal-hal yang telah ditetapkan dalam rencana. Informasi yang spesifik disediakan untuk kepentingan pengawasanlah yang akan lebih bermanfaat dalam usaha meningkatkan seluruh kegiatan pengawasan yang akan dijalankan.

Tabel 4.1  
Pelaksanaan Pengawasan Internal Inspektorat Daerah  
dari Aspek Sintaktika

No	Aspek	Makna
1	Sintaktika	Inspektorat Kabupaten Jeneponto sebagai pengawas internal dilingkungan Kabupaten Jeneponto memiliki kepentingan untuk menyampaikan suatu informasi terhadap pengguna. Simbol atau tanda pada Inspektorat Kabupaten Jeneponto dalam kegiatan pengawasan bisa didapatkan dalam standar operasional prosedur pemeriksaan reguler. Pada tataran sintaktika, untuk menciptakan pengawasan yang baik Inspektorat Kabupaten Jeneponto telah merancang prosedur pengawasan yang terstruktur dan telah tertuang dalam standar operasional prosedur pemeriksaan reguler pada Inspektorat Kabupaten Jeneponto yang suatu tindakan dalam pelaksanaan pengawasan internal pada tataran pemerintah daerah. Inspektorat tidak lain menekankan pada perencanaan program pengawasan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan, serta pertanggungjawaban hasil pengawasan.

## 2. Pelaksanaan Pengawasan Internal Inspektorat Daerah dari Aspek Semantika

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota. Inspektorat sebagai APIP di daerah dituntut memainkan peran untuk mengontrol dan mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat merupakan lembaga perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu kepala pemerintahan (bupati) dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dibidang pengawasan dalam wilayah dan jajaran pemerintahan, yang secara organisator dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab kepada kepala pemerintahan (bupati). Pada implementasi dari pengawasan internal, Inspektorat Kabupaten Jenepono dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, *monitoring* dan evaluasi. Inspektorat Kabupaten Jenepono selain melakukan pengawasan khusus juga melakukan pengawasan berkala yang dilaksanakan setiap tahun terhadap semua satuan kerja perangkat daerah mulai dari dinas, badan, kecamatan sampai kelurahan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut merupakan kewajiban bagi setiap instansi dan terkhusus Inspektorat daerah sebagai APIP, maka jika dalam Islam hukumnya sudah jelas kalau dilaksanakan mendapat pahala dan kalau ditinggalkan mendapat siksa atau sanksi. Sesuai dalam QS. Al-Anfal/8: 27, disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”

Kandungan pada ayat diatas menurut tafsir Jalalayn (tafsir Al-Qur'an yang disusun oleh Jalaluddin al-Mahalli pada tahun 1459 dan dilanjutkan oleh muridnya Jalaluddin as-Suyuthi pada tahun 1505) ialah bagi orang-orang yang beriman janganlah kalian mengkhianati Allah dan rasul-Nya dan jangan pula kalian mengkhianati amanat-amanat kalian yakni apa-apa yang dipercayakan kepada kalian berupa agama dan hal-hal yang lain sedangkan kalian mengetahui. Kemudian dijelaskan pula mengenai amanah dalam QS. Al-Mu'minun/23: 8, disebutkan:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Terjemahnya:

“Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.”

Berdasarkan kandungan pada ayat diatas menurut tafsir Quraish Shihab bahwa orang-orang mukmin selalu menjaga apa saja yang diamanatkan kepadanya, baik harta, perkataan (pesan) atau perbuatan dan sebagainya. Juga selalu menepati janji mereka kepada Allah dan janji antara sesama mereka. Mereka tidak mengkhianati amanat dan juga tidak melanggar janji. Berangkat dari dua ayat tersebut, maka kunci sukses untuk menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan baik berdasarkan kepegawaian maupun kebijakan internal dan terlebih lagi kita sebagai muslim adalah mengakui dan

menerima tugas serta jabatan tersebut sebagai amanah dan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut harus tumaninah. Setiap posisi tersebut juga sudah diatur persyaratan dan tanggungjawabnya sehingga dapat lebih tertib dan teratur dalam pembagiannya. Kondisi ini kita susun bersama agar mendapat amanah untuk bertugas dan berfungsi dengan baik.

Pada tataran semantika membahas tentang kegiatan atau realisasi fisis yang menjadi simbol-simbol pada standar operasional prosedur pemeriksaan reguler. Inspektorat Kabupaten Jeneponto diharapkan dapat mengendalikan segala bentuk kegiatan kerja sehingga dapat terlaksana sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan. Maka dari itu, Inspektorat daerah selain mengetahui tugas dan fungsinya, juga harus menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Analisis semiotika pada tataran semantika pada Inspektorat Kabupaten Jeneponto berdasarkan hasil penelitian di lapangan adalah sebagai berikut:

a) Analisis Semantika pada Simbol Fisik Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Reguler

Simbol dalam bidang akuntansi memiliki makna sangat mendalam. Kebanyakan orang ketika mendengar simbol dalam akuntansi, akan menuntun kepada sebatas angka dan kata saja. Analisis semantika dalam semiotika berguna untuk menuntun para pembaca bahwa yang termasuk simbol, bukan sekedar itu saja melainkan bisa berupa sesuatu seperti dokumen atau laporan.

Simbol fisik pada Inspektorat Kabupaten Jeneponto pada standar operasional prosedur pemeriksaan berupa output yang dihasilkan dalam proses pengawasan,



yaitu: nota dinas; surat tugas; program kerja pemerintahan (PKP); hasil klarifikasi/rekonsiliasi; bukti-bukti pendukung;; naskah hasil pemeriksaan (NHP); serta laporan hasil pemeriksaan (LHP). Pada dasarnya output tersebut dimasukkan sebagai bagian dari simbol karena merupakan salah satu bagian dari proses pengawasan yang dijadikan sebagai penilaian.

b) Analisis Semantika pada simbol Kata pada Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Reguler

Selain simbol berupa fisik, aspek kata juga tertuang dalam standar operasional prosedur pemeriksaan reguler Inspektorat Kabupaten Jeneponto. Adapun penyimbolan (analisis semantika) adalah sebagai berikut:

1) Proses Persiapan dan Perencanaan

Dalam melakukan suatu pengawasan terlebih dahulu Inspektorat Kabupaten Jeneponto membuat perencanaan dan persiapan pemeriksaan. Inspektur kabupaten mengeluarkan nota dinas kepada Irbanwil untuk membuat usulan rencana pemeriksaan berdasarkan program kerja pengawasan tahunan. Kemudian irbanwil dan kasubag program membuat usulan rencana pemeriksaan. Usulan tersebut kemudian dievaluasi dan jika telah disepakati maka dibuatlah surat tugas yang kemudian ditandatangani oleh Bupati selaku kepala pemerintahan dan menyerahkan kepada tim pemeriksa Inspektorat.

2) Pelaksanaan Penugasan dan Pemeriksaan

Inspektorat Kabupaten Jeneponto, melakukan kegiatan pemeriksaan sesuai dengan sasaran pemeriksaan yang ditetapkan dan harus mencatat semua



kejadian yang ditemukan dalam kegiatan pemeriksaan dan lebih fokus terhadap pengumpulan data, bukti, maupun proses kegiatan yang dianggap tidak relevan. Jika didapatkan perbedaan data, pihak pemeriksa harus melakukan klarifikasi/rekonsiliasi dengan pihak atau sumber yang lebih terpercaya dan berkompeten. Juga dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, jika ditemukan adanya indikasi penyimpangan diluar sasaran pemeriksaan yang telah ditetapkan, pihak Inspektorat melaporkan kepada Inspektur sebagai pertimbangan dilakukannya pemeriksaan sendiri (Pemeriksaan Khusus). Setelah kegiatan pemeriksaan selesai, pihak Inspektorat Kabupaten Jeneponto mengadakan pertemuan dengan pimpinan instansi/SKPD untuk memberikan catatan-catatan lain yang berguna bagi entitas pemeriksaan. Secara rinci kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam kegiatan pemeriksaan akan dikirimkan dalam bentuk Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP).

### 3) Pelaporan Hasil Penugasan

Kegiatan akhir proses pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Jeneponto ialah laporan hasil penugasan. Tim pemeriksa mereview KKP sekaligus melampirkan semua berkas hasil pemeriksaan. Kemudian temuan sementara dituangkan dalam naskah hasil pemeriksaan yang diserahkan ke pengendali teknis untuk direview dan ditandatangani. Selanjutnya memberikan NHP tersebut kepada pimpinan instansi/SKPD, kemudian dari hasil tanggapan NHP tersebut tim pemeriksa melakukan penilaian sebagai bahan untuk penyusunan laporan hasil pemeriksaan (LHP).

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Inspektorat Kabupaten Jeneponto dalam upaya menerapkan pelaksanaan pengawasan internal kepada segenap komponen yang ada dalam organisasi lingkup kerja, memikirkan dan mengemban tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan nilai kontribusi dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik mungkin. Adapun dalam kegiatan pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Jeneponto ialah dalam rangka pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, agar arah dan sasaran pelaksanaan otonomi daerah dapat terwujud sebagaimana mestinya. Untuk melakukan pengawasan yang baik maka perlu adanya standar operasional pemeriksaan. Suatu standar dapat berjalan dengan baik, jika aparatur pemerintah amanah dalam menjalankannya. Artinya bersikap jujur dan dapat diandalkan dalam menjalankan komitmen, tugas, dan kewajiban. Kejujuran adalah kehati-hatian diri seseorang dalam memegang amanah yang telah dipercayakan oleh orang lain kepada dirinya. Karena itu, kejujuran sesungguhnya berkaitan erat dengan nilai kebenaran, termasuk di dalamnya kemampuan mendengarkan, sebagaimana kemampuan berbicara, serta setiap perilaku yang bisa muncul dari tindakan manusia (Kesuma, 2011).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Maskur selaku Inspektur Kabupaten:

“ Menurut saya, Inspektorat Kabupaten Jeneponto setiap tahunnya berusaha memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam perencanaan pemeriksaan yang dilakukan sebelumnya, tujuannya tidak lain untuk meningkatkan kinerja inspektorat. Nah dengan meningkatnya kinerja inspektorat ini, maka juga akan membantu terciptanya pengawasan yang baik.”

Hasil wawancara dengan bapak Hasri Sakti selaku Inspektur Pembantu

Wilayah:

“ Menurut saya, pelaksanaan pengawasan dalam hal pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Jeneponto, temuan yang ditemukan dilapangan kita bandingkan dengan data yang sudah ada sehingga jika mengalami ketidakcocokan barulah kami menindaklanjuti. Yah ini tentu tidak terlepas dari fungsi kami dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Semua hal yang kami lakukan sebagai aparat pengawas intern pemerintah tidak lepas dari fungsi yang seharusnya.”

Lebih lanjut bapak Hasri Sakti menjelaskan mengenai proses pelaksanaan pengawasan:

“ Langkah yang kami lakukan tentunya membuat perencanaan pengawasan terlebih dahulu, kemudian setelah semuanya disetujui barulah kami mulai melakukan pengawasan sesuai prosedur. Kami berusaha membuat prosedur dengan sebaik mungkin agar fungsi kami sebagai pengawas internal dapat tercapai.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan bahwa Inspektorat Kabupaten Jeneponto mengemban tugas yang sangat penting dalam mengawas dan mengawal jalannya pemerintahan di lingkungan Kabupaten Jeneponto. Inspektorat dalam hal ini mengedepankan tujuan pemerintahan. Sesuai dengan teori stewardship adalah suatu keadaan dimana manajer sebagai steward lebih berfokus pada kepentingan bersama atau tujuan organisasi bukan pada keinginan pribadi (Donaldson and davis, 1991). Pengawasan yang dilakukan oleh tim pemeriksa tidak lepas dari peran manajemen yang ada pada suatu organisasi. Dukungan tersebut dilakukan untuk efektivitas pengawasan yang dilakukan dalam hal pemeriksaan agar berjalan dengan baik, efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari organisasi.

Tabel 4.2  
Pelaksanaan Pengawasan Internal Inspektorat Daerah  
dari Aspek Semantika

No	Aspek	Makna
1	Semantika	Pada analisis semantika membahas tentang kegiatan atau realisasi fisis yang menjadi simbol-simbol pada standar operasional prosedur pemeriksaan reguler.
	a) Simbol Fisik	Simbol fisik pada Inspektorat Kabupaten Jeneponto pada standar operasional prosedur pemeriksaan berupa output yang dihasilkan dalam proses pengawasan, yaitu: nota dinas; surat tugas; program kerja pemerintahan (PKP); naskah hasil pemeriksaan (NHP); serta laporan hasil pemeriksaan (LHP).
	b) Simbol Kata	Selain simbol berupa fisik, aspek kata juga tertuang dalam standar operasional prosedur pemeriksaan reguler Inspektorat Kabupaten Jeneponto. Adapun penyimbolan (analisis semantika) yaitu proses persiapan dan perencanaan; pelaksanaan penugasan dan pemeriksaan; serta pelaporan hasil penugasan.

3. Pelaksanaan Pengawasan Internal Inspektorat Daerah dari Aspek Pragmatika

Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah perencanaan telah dilaksanakan sebagai pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan seharusnya terjadi. Keberhasilan pemerintah daerah di semua tingkatan menjadi cerminan bagaimana tampilan pemerintahan di Indonesia. Inilah mengapa perlu

adanya aparat pengawas internal pemerintah di daerah atau dikenal Inspektorat daerah. Inspektorat daerah menjadi pilar yang mempunyai tugas sebagai pengawas dan pengawal dalam pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertata dan tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Untuk menjamin dan menilai sebuah mutu di perlukan sebuah independensi yang kuat, untuk itu organisasi pengawasan harus di berikan independensi yang menyeluruh agar dalam pelaksanaan tugas pengawasannya dapat memberikan keyakinan yang objektif. Aparatur inspektorat juga harus memiliki sikap profesionalisme agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Profesionalisme ialah perilaku bertanggungjawab yang dimiliki oleh seseorang terhadap apa yang telah dikerjakan. Pengawasan sebagai salah satu kunci suksesnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih, harus dilaksanakan secara profesional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Penafsiran aparatur pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Jeneponto atas standar operasional prosedur pemeriksaan reguler pada tataran sintaktik dan semantik merupakan faktor yang melandasi persepsi aparatur tentang manfaat prosedur pemeriksaan pada tataran pragmatik. Prosedur yang disusun sebisa mungkin tidak bias dalam informasinya, artinya prosedur tersebut dapat dipahami oleh para pemeriksa dalam pengawasan tersebut. Analisis pragmatik pada Kantor Inspektorat Kabupaten Jeneponto menunjukkan bahwa prosedur yang disusun sangat memberikan manfaat bagi para pengguna. Pemahaman para aparatur khususnya tim pemeriksa dalam menilai setiap prosedur yang ada dalam standar operasional

prosedur pemeriksaan reguler menjadi suatu indikator dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Jeneponto. Keberhasilan tersebut juga didukung dengan hasil LKPD (laporan keuangan pemerintah daerah) yang telah memperoleh opini wajar dengan pengecualian setelah sebelumnya mendapat opini *disclaimer*. Pelaksanaan pengawasan secara tepat yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Jeneponto, juga memiliki andil dalam opini audit tersebut. Adanya simbol yang tepat yang diterapkan kantor Inspektorat Kabupaten Jeneponto juga menjadi pendukung baiknya suatu pengawasan internal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mustikawaty selaku pejabat fungsional auditor:

“ Pada tahun anggaran 2016, pemerintah Kabupaten Jeneponto mendapat opini *disclaimer* karena pengelolaan asetnya kurang rapi, ada beberapa instansi yang pengelolaannya bermasalah. Nah karena permasalahan ini sehingga Inspektorat berusaha memperbaiki prosedur pemeriksaan. Sehingga pada tahun 2018, Kabupaten Jeneponto berhasil mendapat opini WDP. Ini merupakan suatu peningkatan dan keberhasilan dalam perbaikan standar pemeriksaan yang disusun.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat fungsional auditor, perbaikan prosedur pemeriksaan yang dilakukan guna meningkatkan keberhasilan program pemerintahan. Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintahan Daerah dituntut memainkan peran untuk mengontrol dan mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Agar arah dan sasaran pelaksanaan otonomi daerah dapat terwujud sebagaimana mestinya (Safwan dkk., 2019). Sejalan dengan teori *stewardship* menjelaskan bahwa para pemimpin lebih memfokuskan pada kesuksesan organisasi yang menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok yang

pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu dalam kelompok organisasi. Publik tidak lain mengharapkan bahwa Inspektorat daerah mampu mengeksekusi berbagai laporan atau temuan, persepsi ini muncul karena tindakan yang dilakukan selanjutnya harus berdasarkan keputusan kepala daerah. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Ilham selaku pejabat fungsional auditor;

“ Ya tentunya ada tindakan dari kami selaku pemeriksa terkait kendala yang terjadi. Kami memberikan masukan misalnya dalam aset berupa kendaraan dinas tadi. Itu kami menyampaikan kepada Bendahara di instansi tersebut untuk mengambil atau menarik aset itu.”

Lebih lanjut terkait aset juga dijelaskan oleh Ibu Sukmawaty yang juga selaku pejabat fungsional Auditor;

“ Kalau terkait kendala tersebut, kesalahannya karena saat pemberian kendaraan dinas tersebut tidak ada pernyataan baik itu secara tertulis maupun lisan bahwa ketika pensiun kendaraan dinas tersebut akan dikembalikan. Ini salah satu masalah yang terjadi di beberapa instansi terkait pencacatan aset.”

Hasil wawancara dengan Bapak Maskur selaku Inspektur Kabupaten mengenai sanksi terhadap instansi yang bermasalah.

“ Kami selaku pengawas internal berusaha melakukan tugas dengan baik tapi kembali lagi upaya atau tindakan terhadap penyelewengan atau temuan harus terlebih dahulu disetujui oleh Bupati selaku kepala pemerintahan. Jadi kami tidak bisa asal dalam memberikan sanksi.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, tindakan pengawasan Inspektorat terhadap adanya bukti dan fakta yang ditemukan di lapangan secara garis besar dapat diklasifikasikan pada dua hal pokok tindakan hukum yang ditempuh oleh pihak Inspektorat. Apabila hasil temuan itu terindikasi perbuatan yang melawan hukum dan tidak bisa lagi diperbaiki dan dibina, maka masalah tersebut atas pertimbangan pimpinan diteruskan kepada pihak penegak hukum untuk diproses



dan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan apabila hasil temuan itu terindikasi penyimpangan prosedur atau pelanggaran yang bersifat administratif, maka oleh Inspektorat merekomendasikan kepemimpinan untuk ditegur yang bersangkutan secara tertulis ataukah diberikan sanksi sesuai ketentuan (Safwan dkk., 2019).

Tabel 4.3  
Pelaksanaan Pengawasan Internal Inspektorat Daerah  
dari Aspek Pragmatika

No	Aspek	Makna
1	Pragmatika	Analisis pragmatika pada Kantor Inspektorat Kabupaten Jeneponto menunjukkan bahwa prosedur yang disusun sangat memberikan manfaat bagi para pengguna. Prosedur yang disusun sebisa mungkin tidak bias dalam informasinya. Pemahaman para aparatur khususnya tim pemeriksa dalam menilai setiap prosedur yang ada dalam standar operasional prosedur pemeriksaan reguler menjadi suatu indikator dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Jeneponto. Keberhasilan tersebut juga didukung dengan hasil LKPD (laporan keuangan pemerintah daerah) yang telah memperoleh opini wajar dengan pengecualian setelah sebelumnya mendapat opini <i>disclaimer</i> . Pelaksanaan pengawasan secara tepat yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Jeneponto, memiliki andil dalam opini audit tersebut karena adanya simbol yang tepat yang diterapkan menjadi salah satu pendukung baiknya suatu pengawasan internal.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. *Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis semiotika pada tataran sintaktika, dimana Inspektorat Kabupaten Jeneponto sebagai pengawas internal dilingkungan Kabupaten Jeneponto memiliki kepentingan untuk menyampaikan suatu informasi terhadap pengguna. Simbol atau tanda pada Inspektorat Kabupaten Jeneponto dalam kegiatan pengawasan bisa didapatkan dalam standar operasional prosedur pemeriksaan reguler. Pada tataran sintaktika, untuk menciptakan pengawasan yang baik Inspektorat Kabupaten Jeneponto telah merancang prosedur pengawasan yang terstruktur dan telah tertuang dalam standar operasional prosedur pemeriksaan reguler pada Inspektorat Kabupaten Jeneponto yang suatu tindakan dalam pelaksanaan pengawasan internal pada tataran pemerintah daerah. Inspektorat tidak lain menekankan pada perencanaan program pengawasan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan, serta pertanggungjawaban hasil pengawasan.
2. Analisis semiotika pada tataran semantika membahas tentang kegiatan atau realisasi fisis yang menjadi simbol-simbol pada standar operasional prosedur pemeriksaan reguler. Analisis semiotika pada tataran semantika pada

Inspektorat Kabupaten Jeneponto berdasarkan hasil penelitian di lapangan terbagi dalam dua simbol yaitu pada simbol fisik dan kata. Simbol fisik pada Inspektorat Kabupaten Jeneponto pada standar operasional prosedur pemeriksaan berupa output yang dihasilkan dalam proses pengawasan, yaitu: nota dinas; surat tugas; program kerja pemerintahan (PKP); naskah hasil pemeriksaan (NHP); serta laporan hasil pemeriksaan (LHP). Adapun simbol kata juga tertuang dalam standar operasional prosedur pemeriksaan reguler Inspektorat Kabupaten Jeneponto, yaitu proses persiapan dan perencanaan; pelaksanaan penugasan dan pemeriksaan; serta pelaporan hasil penugasan.

3. Analisis semiotika pada tataran pragmatika Inspektorat Kabupaten Jeneponto menunjukkan bahwa prosedur yang disusun sangat memberikan manfaat bagi para pengguna. Prosedur yang disusun sebisa mungkin tidak bias dalam informasinya. Pemahaman para aparatur khususnya tim pemeriksa dalam menilai setiap prosedur yang ada dalam standar operasional prosedur pemeriksaan reguler menjadi suatu indikator dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Jeneponto. Keberhasilan tersebut juga didukung dengan hasil LKPD (laporan keuangan pemerintah daerah) yang telah memperoleh opini wajar dengan pengecualian setelah sebelumnya mendapat opini *disclaimer*. Pelaksanaan pengawasan secara tepat yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Jeneponto, memiliki andil dalam opini audit tersebut karena adanya simbol yang tepat yang diterapkan menjadi salah satu pendukung baiknya suatu pengawasan internal.

## **B. Keterbatasan dan Saran Penelitian**

Meskipun penelitian ini dapat diselesaikan secara tepat waktu, namun tetap saja ada keterbatasan yang didapatkan dalam prosesnya. Keterbatasan untuk peneliti selanjutnya antara lain:

1. Penelitian ini masih berada pada tataran yang berfokus pada satu kabupaten dalam hal ini pada Kabupaten Jeneponto, sehingga masih banyak data yang kurang untuk menyempurnakan penelitian ini.
2. Masih banyak data yang belum ditemukan oleh peneliti, sehingga hasil penelitian belum menunjukkan hasil maksimal.
3. Waktu wawancara yang terbatas. Hal ini disebabkan oleh kesibukan informan dalam penelitian jelang akhir tahun, di mana kegiatan pemeriksaan rutin yang mulai dilakukan.

Adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya agar sekiranya tulisan ini dapat dijadikan referensi. Peneliti juga berharap agar peneliti selanjutnya dapat mengikuti perkembangan pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat daerah.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak dilakukan jelang pemeriksaan rutin yang dilakukan untuk menghindari keterbatasan wawancara agar peneliti bisa mengkaji lebih dalam dan mengkonfirmasi hal yang terkait dengan penelitian.

### ***C. Implikasi Penelitian***

Penelitian diharapkan mampu memberikan informasi terkait dengan bagaimana pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Jeneponto. Selain itu, tujuan akademis yang paling penting adalah penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, utamanya terkait dengan fungsi inspektorat sebagai pengawas internal. Semoga kedepannya penelitian-penelitian yang dilakukan dapat jauh lebih berkualitas dan menyempurnakan penelitian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rifqi., S. Rahayu, dan D. N. Triyanto. 2016. Pengaruh Etika, Kompetensi, dan Independensi terhadap Kualitas Audit. *e-Proceeding of Management*, 3(3): 3241-3248.
- Adawiyah, Salimatul dan Nur Diana. 2018. Kajian Semiotik Laporan Tahunan PT. Bank Rakyat Inonesia, Tbk Sebelum dan Sesudah menjadi Pemenang Annual Report Award (ARA 2014). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 7(2): 97-105.
- Agustina, Lidya. 2009. Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor. *Jurnal Akuntansi*, 1(1): 40-69.
- Amir, M. Taufik. 2011. *Manajemen Bencana Dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ardika, I. K. dan N. N. S. Ekayani. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Penerimaan Opini Audit Going Concern pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI periode 2007-2011. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika (JINAH)*, 3(1).
- Ardiyanti, M. T., M. Djasli, dan G. A. Harwida. 2016. Peran Inspektorat Kabupaten Smenep dalam Pengawasan Pengadaan Barang Milik Daerah. *Jurnal PAMATOR*, 9(1): 1-7.
- Arief, I. S., M. Suun, dan A. Djunaid. 2018. Pengaruh Kedudukan Kelembagaan, Ambiguitas Peran dan Konflik Peran terhadap Independensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Budaya Lokal sebagai Variabel Moderating. *Journal of Management and Business*, 1(2): 128-155.
- Arif, Muhammad. 2018. Implementasi Pakta Integritas Auditor Inspektorat dalam Meningkatkan Kinerja Pengawasan Pemerintahan Kabupaten Takalar. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 7(1): 1-10.
- Belkaoui, Ahmed R. 2006. *Teori Akuntansi*. Cambridge : The University Press.
- Bungin, H. M. Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya Edisi Pertama Cetakan Ketiga*. Jakarta: Kencana.
- Byusi, Hafid dan Fatchan Achyani. 2017. Determinan Opini Audit Going Concern (Studi Empiris pada Perusahaan Real Estate dan Property yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(1): 13-28.
- Donaldson, L, dan Davis J. H. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16.

- Fitriani, Indah dan Yuga Luthfi Hidayat. 2013. Pengaruh Objektivitas dan Integritas Auditor Internal terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 1 (1): 61-72.
- Hamzah, N., A. Mattulada, dan M. Ikbil. 2018. Pengaruh Hasil Pengawasan Internal dan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat terhadap Kinerja Keuangan SKPD Di Kabupaten Tojo Una-Una. *E-Journal Katalogis*, 6(2): 41-52.
- Hanafi, Wahyu. 2017. Semiotika Al-Quran: Representasi Makna Verba Reflektif Perilaku Manusia dalam Surat Al-Maun dan Bias Sosial Keagamaan. *Dialogia*, 15(1): 1-22.
- Haris, Abdul dan Heri Kusmanto. 2016. Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1): 75-86.
- Harmawan, W., R. Yunus, dan A. Murfhi. 2012. Analisis Pelaksanaan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1): 47-54).
- Haryanto, N. O. dan C. Susilawati. 2018. Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(1): 42-55.
- <https://islam.nu.or.id/post/read/63870/anjuran-islam-tentang-etos-kerja-dan-profesionalisme>
- <https://tafsirq.com/23-al-muminun/ayat-8#tafsir-quraish-shihab>
- <https://tafsirq.com/8-al-anfal/ayat-27#tafsir-jalalayn>
- Huong, T. T. 2018. Factors Affecting the Effectiveness: an Ethiopian Public Sector Study. *Managerial Auditing Journal*, 22(5): 470-484.
- Jesika, M. L., R. P. Simanjuntak, dan S. Sihombing. 2015. Independensi dan Tanggung Jawab Auditor dan Pengaruhnya terhadap Opini Auditor. *Jurnal Ilmiah*, 19(3): 1-10.
- Juwita, Rukmi. 2013. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan keuangan. *Jurnal Trikonomika*, 12(2): 201-214.
- Kesuma, Darma., dkk. 2011. *Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*. Bandung. Rosda Karya.
- Kriyantono, R. 2007. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Kurniawan, D. S. A., Nadirsyah, dan S. Abdullah. 2017. Pengaruh Independensi Auditor, Etika Profesi dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Auditor di BPK Perwakilan Provinsi Aceh. *Jurnal Megister Akuntansi*, 6(3): 49-57.



- Littlejohn, S. W. 2009. *Theories of Human Communication (Edisi 9)*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Lusiana., A. Djamhuri, dan Y. W. Prihatiningtias. 2017. Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. *Jurnal Economia*, 13(2): 171-190.
- Mahanani, Setyo. 2018. Kualitas Pengawasan Keuangan Daerah di Inspektorat Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Among Makarti*, 11(21): 70-83.
- Manialup, A. W., G. B. Nangoi, dan J. Morasa. 2017. Peran Inspektorat Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 8(2): 20-29.
- Marlaini., Aliamin, dan M. Indriani. 2018. Evaluasi Efektivitas Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Paradigma Baru. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(1): 95-108.
- Mifti, Sri., N. B. Lestariyo, dan A. Kowanda. 2009. Pengawasan Internal dan Kinerja. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 3(14): 1-11.
- Mihret, D. G. dan A. W. Yismaw. 2007. Internal Audit Effectiveness: an Ethiopian Public Sector Study. *Managerial Auditing Journal*, 22(5): 470-484.
- Muis, Muhammad Amirul Haq. 2014. Analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2): 73-82.
- Mulyadi. 2002. *Auditing*. Buku 1 Jilid ke 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Mutiawanthi. 2017. Tantangan Role / Peran yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali ke Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 4(2): 104-114.
- Neuman. W. Lawrence. 2010. *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Allynand Bacon.
- Novriyansah, A., N. Kurniah, dan A. Suprpti. 2017. Studi tentang Perkembangan Karakter Jujur pada Anak Usia Dini. *Jurnal Potensia*, 2(1): 14-22.
- Nurmayani, T. H. dan E. Deviani. 2018. Peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara*, 5(1): 1-11.
- Oktaviani., Rusliyawati, dan E. Heniwati. 2017. Analisis Atas Annual Report PT Timah Tbk: Studi Interpretive dalam Perspektif Semiotika dan Retorika. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 6(2): 139-160.
- Rante, I., A. Salle, dan E. R. Marlissa. 2018. Analisis Terhadap Pemberian Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 3(2): 1-12.

- Riduwan, Akhmad. 2010. *Semiotika Laba Akuntansi: Studi Kritisal-Posmodernis Derridean*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Risambessy, Richard Izaac. 2009. Analisis Manajemen Aset Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lamongan (Studi tentang Aset Tetap Berwujud Objek Wisata Daerah). *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 6(1): 183-242.
- Rofingatun, Siti. 2018. Pengaruh Independensi dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Auditor. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 13(2): 90-104.
- Salahuddin, A. dan A. Irwanto. 2013. *Pendidikan Karakter*. Jakarta: CV Pustaka Setia.
- Setianto, H. 2004. *Standar Profesi Audit Internal*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Internal Audit.
- Setiawan, H. dan T. S. Putro. 2013. Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4 (2): 119-218.
- Siagian, Sondang P. 2005. *Fungsi-Fungsi Manajerial Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sihite, Renny Novsellia dan Holiawati. 2017. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, SPI dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 9(2): 81-92.
- Sirajuddin, Betri dan Ade Riza Oktaviani. Integritas Auditor sebagai Pemoderasi: Pengaruh Kompetensi, Independensi, Kompleksitas Tugas dan Audit Time Budget terhdap Kualitas Audit. *Journal Balance*, 15(1): 90-110.
- Sudiran dan Ahmad Jubaidi. 2018. Tinjauan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Berdasarkan Internal Audit Capability Model untuk Mewujudkan Peran yang Efektif di Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1): 1-15.
- Susilo, Pria Andono dan Tri Widyastuti. 2015. Integritas, Objektivitas, Profesionalisme Auditor dan Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik Jakarta Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan (JRAP)*, 2(1): 65-77.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan* (Edisi 3). Yogyakarta: BPFE.
- Suwita, M. K. dan S. G. Arnan. 2015. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 1(2): 289-296.
- Syafrizal, S. H., N. Mawaddah, dan E. Zulfiar. 2018. Kualitas Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam Pengawasan Keuangan Daerah Di Kota Lhokseumawe. *Proceeding*, 2(1): 25-29.



- Trisnawati, N., W. Banga, dan S. Alam. 2018. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah di Kabupaten Konawe. *Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 9(2): 51-60.
- Umar, Zulkifli., C. F. Syawalina, dan Khairunnisa. 2018. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh. *Jurnal Kolegial*, 6(2): 136-148.
- Wulandari, S. G. dan D. G. D. Suputra. 2018. Pengaruh Profesionalisme Auditor, Komitmen Organisasi dan Etika Profesi pada Kinerja Auditor KAP Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(1): 273-300.
- Yaumi, Muhammad. 2014. *Pendidikan Karakter: Landasan, Pilar, dan Implementasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yusuf, Muhammad. 2014. Pengaruh Kompetensi, Objektivitas dan Integritas Auditor terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor. *Jurnal Akuntansi*, 2(3): 1-29.





# LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



**LAMPIRAN I**

**PERSURATAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PERSURATAN



120191914216303

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

Nomor : 25845/S.01/PTSP/2019  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Bupati Jeneponto

di:  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor : 6396/EB.IPP.00.9/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : FEBRINA SAFITRI AHMAD  
Nomor Pokok : 90400115148  
Program Studi : Akuntansi  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

"KAJIAN FUNGSI INSPEKTORAT TERKAIT PENGAWASAN INTERNAL :  
SEBUAH PENDEKATAN SEMIOTIKA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 01 Desember 2019 s/d 15 Januari 2020

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 15 November 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth  
1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar;  
2. Poringgol.

SDMAP-PTSP 20-11-2019



Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://elmap.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231





**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Ishak Iskandar No. 30 Rantasinggri Telp. (0419) 2410044 Kode Pos 92311

**IZIN PENELITIAN**

Nomor: 73.4/237/IP/DPMP/TSP/XI/2019

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengemhangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto Nomor : 240/XI/REK-IP/DPMP/TSP/2019

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : FEBRINA SAFITRI AHMAD  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nomor Pokok : 90400115148  
Program Studi : Akuntansi  
Lembaga : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : BTN Bumi Empoang Permai, Kel.Empoang, Kec.Binamu, Kab.Jeneponto  
Tempat Meneliti : Inspektorat Kabupaten Jeneponto

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

**KAJIAN FUNGSI INSPEKTORAT TERKAIT PENGAWASAN INTERNAL :SEBUAH  
PENDEKATAN SEMIOTIKA (STUDI PADA INSPEKTORAT KABUPATEN JENEPONTO**

Lamanya Penelitian : 01 Desember 2019 s/d 15 Januari 2020

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jeneponto Cq. Bidang Penelitian & Pengembangan.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jeneponto, 01 Desember 2019

**KEPALA DINAS,**



**Hj. MERNAWATI, S. IP, M. Si**

Pangkat : Pembina Tk I

NIP : 19771231 200212 2 015

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Jeneponto di Jeneponto;
2. Arsip.

M A K A S S A R



**LAMPIRAN II**

**MANUSKRIP**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## Lampiran II

### LAMPIRAN MANUSKRIP

#### *Kajian Fungsi Inspektorat terkait Pengawasan Internal:*

#### *Sebuah Pendekatan Semiotika*

#### *(Studi pada Inspektorat Kabupaten Jeneponto)*

#### Inspektur Inspektorat Kabupaten Jeneponto

1. Bagaimana pandangan Bapak mengenai fungsi Inspektorat Kabupaten?
2. Dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan semiotika, salah satu sisinya ialah sintaktik, dimana secara garis besar bahwa sintaktika ini merupakan pemaknaan simbol dari fungsi inspektorat dalam hal pengawasan. Bagaimana pandangan Bapak mengenai pengawasan internal Inspektorat Kabupaten Jeneponto?
3. Kemudian sisi semantik merupakan penekanan yang dilakukan pada pembahasan masalah penyimbolan pada realitas ke dalam tanda-tanda sehingga orang dapat membayangkan kegiatan fisis yang dilakukan instansi. Bagaimana pandangan Bapak, apakah inspektorat telah melakukan fungsinya jika dilihat dari sisi semantik?
4. Bagaimana kemudian tindakan yang dilakukan inspektorat mengenai standar operasional pemeriksaan?
5. Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam pemeriksaan atau pengawasan yang dilakukan Inspektorat daerah kepada instansi pemerintahan pasti ada permasalahan yang terjadi. Bagaimana kemudian sanksi yang diberikan Inspektorat daerah terkait hal tersebut?

### **Inspektur Pembantu Wilayah**

1. Bagaimana pandangan Bapak mengenai fungsi Inspektorat Kabupaten?
2. Bagaimana pandangan Bapak mengenai tujuan pengawasan?
3. Kemudian sisi semantik merupakan penekanan yang dilakukan pada pembahasan masalah penyimbolan pada realitas ke dalam tanda-tanda sehingga orang dapat membayangkan kegiatan fisis yang dilakukan instansi. Bagaimana pandangan Bapak, apakah inspektorat telah melakukan fungsinya jika dilihat dari sisi semantik?
4. Bagaimana kemudian langkah Inspektorat daerah dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas internal?

### **Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Kabupaten**

1. Selama melakukan pemeriksaan, apakah ada kendala yang ditemukan?
2. Apa tindakan yang Bapak/Ibu lakukan sebagai pemeriksa (PFA Inspektorat) terkait dengan kendala tersebut?
3. Pragmatika merupakan reaksi yang muncul dari pihak yang dituju atau terkait dengan perubahan perilaku terhadap informasi. Bagaimana bapak/Ibu melihat hal tersebut?
4. Mengapa pihak luar menganggap kinerja Inspektorat Kabupaten Jeneponto kurang maksimal?





## **LAMPIRAN III**

## **RESUME WAWANCARA**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Lampiran III

RESUME WAWANCARA

Inspektur Inspektorat Kabupaten Jeneponto

Nama Informan : Maskur, S.Ag., M.H

Jabatan : Inspektur Kabupaten

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pandangan Bapak mengenai fungsi Inspektorat Kabupaten?	<i>Inspektorat ini merupakan aparat pengawas intern pemerintah (APIP) di Kabupaten yang memiliki fungsi dalam hal pengawasan, baik itu pengawasan khusus maupun pengawasan berkala yang dilaksanakan setiap tahun agar tercapai pemerintahan yang baik dan bersih.</i>
2	Dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan semiotika, salah satu sisinya ialah sintaktik, dimana secara garis besar bahwa sintaktika ini merupakan pemaknaan simbol dari fungsi inspektorat dalam hal pengawasan. Bagaimana pandangan Bapak mengenai pengawasan internal Inspektorat Kabupaten Jeneponto?	<i>Menurut saya, pengawasan internal merupakan suatu upaya dalam pemerintahan agar kinerja dan tujuan dari pemerintah daerah dapat tercapai. Karena dengan adanya pengawasan ini, maka kita dapat mengetahui apa-apa saja yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan terhadap program-program pemerintahan yang ada. Apalagi Inspektorat Kabupaten Jeneponto ini merupakan APIP dilingkungan Kabupaten Jeneponto yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal jalannya program pemerintahan.</i>

M A K A S S A R

3	<p>Kemudian sisi semantik merupakan penekanan yang dilakukan pada pembahasan masalah penyimbolan pada realitas ke dalam tanda-tanda sehingga orang dapat membayangkan kegiatan fisis yang dilakukan instansi. Bagaimana pandangan Bapak, apakah inspektorat telah melakukan fungsinya jika dilihat dari sisi semantik?</p>	<p><i>Menurut dari pengamatan yang saya lihat, Inspektorat Kabupaten Jeneponto sudah melakukan fungsinya dengan baik dalam hal pengawasan guna mencapai tujuan pemerintahan. Kami setiap tahunnya berusaha memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam perencanaan yang dilakukan sebelumnya, tujuannya tidak lain untuk meningkatkan kinerja inspektorat. Nah dengan meningkatnya kinerja inspektorat ini, maka juga akan membantu terciptanya pengawasan yang baik.</i></p>
4	<p>Bagaimana kemudian tindakan yang dilakukan inspektorat mengenai standar operasional pemeriksaan?</p>	<p><i>Seperti yang saya katakan tadi, salah satu usaha untuk memperbaiki pengawasan tersebut ialah kami menyusun standar operasional prosedur pemeriksaan reguler dengan rinci dan sangat detail, sehingga pengawasan yang dilakukan lebih terarah. Selain itu, upaya lainnya ialah kami memberikan sanksi atau teguran jika ada instansi yang tidak patuh atau tidak sesuai dengan aturan yang ada.</i></p>
5	<p>Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam pemeriksaan atau pengawasan yang dilakukan Inspektorat daerah kepada instansi pemerintahan pasti ada permasalahan yang terjadi. Bagaimana kemudian sanksi yang diberikan Inspektorat daerah terkait hal tersebut?</p>	<p><i>Kami selaku aparat Inspektorat telah melakukan tugas kami sebagaimana mestinya, tapi kembali lagi upaya atau tindakan terhadap penyelewengan atau temuan harus terlebih dahulu disetujui oleh Bupati selaku kepala pemerintahan. Jadi kami tidak bisa asal dalam memberikan sanksi.</i></p>

**Inspektur Pembantu Wilayah**

**Nama : Hasri Sakti, S.P**

**Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah IV**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pandangan Bapak mengenai fungsi Inspektorat Kabupaten?	<i>Inspektorat merupakan salah satu lembaga APIP yang dimana memiliki fungsi dalam bidang pengawasan. Pengawasan ini tidak lain dilakukan sebagai wujud pencegahan dan pembinaan kepada instansi-instansi dan lembaga lainnya.</i>
2	Bagaimana pandangan Bapak mengenai tujuan pengawasan?	<i>Tentunya tujuan pengawasan itu sendiri untuk menghindari dan mencegah penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi terhadap pelaksanaan program-program pemerintahan baik dalam tingkatan SKPD, kecamatan, kelurahan maupun desa.</i>
3	Sisi semantik merupakan penekanan yang dilakukan pada pembahasan masalah penyimbolan pada realitas ke dalam tanda-tanda sehingga orang dapat membayangkan kegiatan fisis yang dilakukan instansi. Bagaimana pandangan Bapak, apakah inspektorat telah melakukan fungsinya jika dilihat dari sisi semantik?	<i>Menurut saya jika dilihat dari sudut pandang semantika, dalam pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Jeneponto saat ini sudah terkoordinasi dengan baik, temuan yang ditemukan dilapangan kita bandingkan dengan data yang sudah ada sehingga jika mengalami ketidakcocokan barulah kami menindaklanjuti. Yah ini tentu tidak terlepas dari fungsi kami dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Semua hal yang kami lakukan sebagai aparat pengawas intern pemerintah tidak lepas dari fungsi yang seharusnya.</i>

4	Bagaimana kemudian langkah Inspektorat daerah dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas internal?	<i>Langkah yang kami lakukan tentunya membuat perencanaan pengawasan terlebih dahulu, kemudian setelah semuanya disetujui barulah kami mulai melakukan pengawasan sesuai prosedur. Kami berusaha membuat prosedur dengan sebaik mungkin agar fungsi kami sebagai pengawas internal dapat tercapai.</i>
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Kabupaten**

**Nama : Ilham J, S.H**

**Jabatan : Pejabat Fungsional Auditor (PFA)**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Selama melakukan pemeriksaan, apakah ada kendala yang ditemukan?	<i>Kalau masalah kendala pastinya kita temui. kendala yang dialami selama dilapangan, khususnya di instansi-instansi itu masalah asetnya, aset tercatat namun barangnya tidak ada. Nah, itu membuat kita sebagai pemeriksa mengalami hambatan karena kita harus memastikan bahwa aset tersebut misalnya mobil atau motor dinas masih ada.</i>
2	Apa tindakan yang Bapak/Ibu lakukan sebagai pemeriksa (PFA Inspektorat) terkait dengan kendala tersebut?	<i>Ya tentunya ada tindakan dari kami selaku pemeriksa terkait kendala yang terjadi. Kami memberikan masukan misalnya dalam aset berupa kendaraan dinas tadi. Itu kami menyampaikan kepada Bendahara di instansi tersebut untuk mengambil atau menarik aset itu.</i>
3	Pragmatika merupakan reaksi yang muncul dari pihak yang dituju atau terkait dengan perubahan perilaku terhadap informasi. Bagaimana bapak/Ibu melihat hal tersebut?	<i>Kalau dilihat dari sudut pandang pragmatika seperti yang telah dijelaskan, Inspektorat Kabupaten Jeneponto sudah melakukan fungsinya sebagai pengawas internal pemerintah. Kami setiap tahunnya telah memperbaiki program-program pengawasan yang dinilai kurang efektif. Yah memang hasilnya belum terlihat secara signifikan, jadi wajar jika masyarakat yang melihat menilai kinerja inspektorat belum maksimal.</i>

**Nama** : Aryanto Massiri, S.Kom., M.M  
**Jabatan** : Pejabat Fungsional Auditor (PFA)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Selama melakukan pemeriksaan, apakah ada kendala yang ditemukan?	<i>Kalau kendalanya di desa-desa itu pada akses jalannya dan jarak tempuh. Misalnya kita ingin melihat pembuatan jalan setapak namun tempatnya itu sulit dijangkau. Jadi untuk efisiennya kita hanya melakukan wawancara saja dengan pihak yang bersangkutan</i>
2	Apa tindakan yang Bapak/Ibu lakukan sebagai pemeriksa (PFA Inspektorat) terkait dengan kendala tersebut?	<i>Terkait kendala yang ada, kita sebagai aparatur inspektorat memberikan sanksi harus sesuai persetujuan kepala daerah dalam hal ini Bupati. Karena tindakan yang kami berikan dilaporkan ke inspektur kemudian inspektur meminta saran kepada bupati barulah setelah itu kita bisa menindaklanjutinya.</i>
3	Pragmatika merupakan reaksi yang muncul dari pihak yang dituju atau terkait dengan perubahan perilaku terhadap informasi. Bagaimana bapak/Ibu melihat hal tersebut?	<i>Menurut saya, Inspektorat Kabupaten Jeneponto telah berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan fungsinya. Langkah sebagai pengawas internal yang efektif dan efisien dalam memenuhi tuntutan telah kami lakukan seperti perbaikan sistem, pembuatan standar operasional pemeriksaan dan lain-lain, tapi kembali lagi hasil dari upaya tersebut tidak langsung terlihat melainkan berproses.</i>



Nama : Mustikawaty Gama, S.P  
Jabatan : Pejabat Fungsional Auditor (PFA)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Selama melakukan pemeriksaan, apakah ada kendala yang ditemukan?	Kendala yang kami dapat selama pemeriksaan itu, misalnya pada bangunan sekolah. Itu biasanya bangunannya tidak memiliki sertifikat atas tanah dan bangunan.
2	Apa tindakan yang Bapak/Ibu lakukan sebagai pemeriksa (PFA Inspektorat) terkait dengan kendala tersebut?	Kalau terkait kendala tersebut, kesalahannya karena saat pemberian kendaraan dinas tersebut tidak ada pernyataan baik itu secara tertulis maupun lisan bahwa ketika pensiun kendaraan dinas tersebut akan dikembalikan. Ini salah satu masalah yang terjadi di beberapa instansi terkait pencacatan aset.
3	Mengapa pihak luar menganggap kinerja Inspektorat Kabupaten Jeneponto kurang maksimal?	Hal ini karena pada tahun anggaran 2016, pemerintah Kabupaten Jeneponto mendapat opini disclaimer karena pengelolaan asetnya kurang rapi, ada beberapa instansi yang pengelolaannya bermasalah. Nah karena permasalahan ini sehingga yang disorot ialah kinerja inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah yang dianggap kurang maksimal. Tapi pada tahun 2018, Kabupaten Jeneponto berhasil mendapat opini WDP. Menurut kami itu merupakan suatu peningkatan, namun hal itu tidak mempengaruhi pandangan pihak luar.

The logo of Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar is a large, stylized green emblem. It features a central shield-like shape with a yellow and red crest inside. The emblem is composed of several overlapping geometric shapes, including a large 'U' and 'A' that form the main structure. The text 'LAMPIRAN IV' is centered over the emblem.

## **LAMPIRAN IV**

## **SOP PEMERIKSAAN REGULER**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



Lampiran IV

Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Reguler

Inspektorat Kabupaten Jeneponto

Persiapan dan Perencanaan

NO	PROSEDUR	JANGKA WAKTU	OUTPUT
1	Inspektur Kabupaten mengeluarkan Nota Dinas kepada Irbanwil untuk membuat usulan Rencana Pemeriksaan berdasarkan PKPT.	5 Menit	Nota Dinas
2	Irbanwil bersama Kasubag Program membuat usulan rencana pemeriksaan.	3 Jam	Jadwal, Objek Pemeriksaan dan Personil Pemeriksa
3	Usulan rencana pemeriksaan Irbanwil dan Kasubag Perencanaan diajukan ke Inspektur Kabupaten untuk dievaluasi dan dibantu oleh Sekretaris.	2 Jam	Jadwal, Objek Pemeriksaan dan Personil Pemeriksa telah dievaluasi
4	Konsep penugasan hasil evaluasi oleh Inspektur selanjutnya dibuatkan Konsep Surat Tugas oleh Kasubag Program dan diserahkan kembali ke Inspektur.	3 Jam	Konsep Surat Tugas
5	Inspektur dan Sekda memparaf Konsep Surat Tugas dan menyampaikan kepada Bupati untuk diproses tanda tangan.	2 Hari	Surat Tugas

6	Surat Tugas yang telah ditandatangani oleh Bupati Jeneponto diteruskan kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian, Cq. Petugas Surat Menyurat untuk penomoran dan penggandaan.	15 Menit	Surat Tugas
7	Kasubag. Umum dan Kepegawaian menyerahkan Surat Tugas kepada Ketua Tim.	10 Menit	Surat Tugas

**Pelaksanaan Penugasan dan Pemeriksaan**

NO	PROSEDUR	JANGKA WAKTU	OUTPUT
1	Ketua Tim membuat Program Kerja Pemeriksaan (PKP) yang diketahui oleh Pengendali Teknis.	1 Hari	PKP
2	Program Kerja Pemeriksaan disampaikan oleh Ketua Tim yang didampingi oleh Pengendali Teknis kepada Anggota Tim, dan wajib melaksanakan penugasan sesuai dengan Surat Tugas yang telah dibuat.	2 Jam	PKP
3	Tim datang ke Instansi/SKPD obyek yang diperiksa. Kemudian Pengendali Teknis melakukan pembicaraan awal dengan Pimpinan Instansi/SKPD untuk menyampaikan maksud akan dilaksanakan pemeriksaan.	1 Hari	Notulen Kesepakatan

4	Tim melakukan kegiatan pemeriksaan sesuai dengan sasaran pemeriksaan yang ditetapkan dan harus mencatat semua kejadian yang ditemukan dalam kegiatan pemeriksaan dan lebih fokus terutama terhadap mengumpulkan data/ bukti/ proses kegiatan yang dianggap tidak relevan.	8 Hari	KKP dan bukti-bukti pendukung
5	Jika didapatkan perbedaan data, Tim harus melakukan klarifikasi/ rekonsiliasi dengan pihak/ sumber yang lebih terpercaya/ berkompeten.	1 Hari	Hasil klarifikasi/rekonsiliasi
6	Jika dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan ditemukan adanya indikasi penyimpangan diluar sasaran pemeriksaan yang telah ditetapkan, harus dilaporkan kepada Inspektur untuk pertimbangan dilakukan pemeriksaan sendiri (Pemeriksaan Khusus).	1 Hari	Nota Dinas pengembangan pemeriksaan
7	Setelah kegiatan pemeriksaan selesai Tim mengadakan pertemuan dengan Pimpinan Instansi/SKPD untuk memberitahukan bahwa kegiatan pemeriksaan telah selesai, sekaligus memberikan catatan-catatan lain yang berguna bagi entitas pemeriksaan. Secara rinci kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam kegiatan pemeriksaan akan dikirimkan dalam bentuk Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP).	1 Hari	Pemberitahuan berakhirnya pemeriksaan

**Pelaporan Hasil Penugasan**

NO	PROSEDUR	JANGKA WAKTU	OUTPUT
1	Anggota Tim menyerahkan KKP kepada Ketua Tim untuk direview, sekaligus dilampirkan semua berkas hasil pemeriksaan.	1 Hari	Review KKP
2	Ketua Tim bersama Pengendali Teknis merumuskan temua sementara yang akan diangkat dalam NHP.	1 Hari	Pemetaan Temuan Pemeriksa
3	Ketua Tim melakukan proses penyusunan NHP atas rumusan temuan sementara yang telah ditetapkan.	2 Hari	NHP
4	NHP diserahkan ke Pengendali Teknis untuk direview dan ditandatangani, dan selanjutnya diserahkan ke anggota Tim.	2,5 Jam	Penandatanganan NHP
5	Anggota Tim mengirimkan NHP ke Pimpinan Instansi/SKPD yang diperiksa.	2 Jam	NHP terkirim
6	Menunggu tanggapan NHP dari Pimpinan Instansi/SKPD	5 Hari	Tanggapan NHP
7	Setelah mendapat tanggapan NHP dari Pimpinan Instansi/SKPD yang diperiksa, Tim pemeriksa melakukan penilaian terhadap tanggapan NHP yang diterima sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).	2 Jam	Rangkuman temuan final

8	Ketua Tim dan Anggota Tim menyusun konser LHP, selanjutnya diserahkan ke pengendali teknis.	3 Hari	Konsep LHP
9	Pengendali Teknis mereview konsep LHP, kemudian konsep LHP diajukan ke Inspektur lewat Irbanwil.	1 Hari	Pengajuan Konsep LHP
10	Inspektur melakukan review ulang, menyetujui LHP untuk selanjutnya diserahkan kepada Ketua Tim.	1 Hari	LHP
11	Ketua Tim menyerahkan LHP ke Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk didistribusikan.	15 Menit	Penyerahan LHP
12	Kasubag. Umum dan Kepegawaian melakukan Penomoran dan sekaligus menggandakan dan menjilid LHP, selanjutnya menyerahkan pada: -	4 Jam	Penomoran, Penggandaan dan Penjilidan LHP
13	Kasubag Umum dan Kepegawaian mengirimkan LHP kepada Bupati dan tembusan kepada pihak terkait.	1 Hari	Pengiriman LHP
14	Petugas Operator pada Subbag Evaluasi dan Pelaporan menginput data temuan sebagai bahan tindak lanjut.	3 Jam	Input Data Hasil Pemeriksaan



**LAMPIRAN V**  
**DOKUMENTASI**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## Lampiran V

### DOKUMENTASI



**Wawancara Inspektur Pembantu Wilayah  
(Bapak Hasri Sakti, SP.)**







**Wawancara dengan Pejabat Fungsional Auditor**

**(Bapak Ilham J, SH.)**



**Wawancara dengan Pejabat Fungsional Auditor**

**(Bapak Aryanto Massiri, S.Kom., M.AP.)**





**Wawancara dengan Pejabat Fungsional Auditor**

**(Ibu Mustikawaty Gama, SP.)**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Febrina Safitri Ahmad, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 09 Februari 1997. Anak keempat dari lima bersaudara, anak dari pasangan bapak Ahmad dan ibu Djumariah Erang.

Menempuh pendidikan dibangku sekolah dasar di SD Inpres No. 113 Balang II, lulus tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Binamu, lulus tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri Khusus Jenepono, lulus tahun 2015. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Akuntansi. Selama diperguruan tinggi, penulis pernah bergabung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan. Penulis menjalani program Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 45 hari di Kabupaten Sinjai Kecamatan Bulupoddo Desa Lamatti Riawang pada tahun 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR